

BAB III

PEMBAHASAN

A. Catatan Pembuka

Kasus-kasus yang berkaitan dengan isu rasialisme dan etnisitas di Indonesia memang sudah tak perlu dipermasalahakan lagi akan pemberitaannya. Kasus-kasus yang mengangkat dua isu itu memang bermula dari era penjajahan Barat, khususnya di masa kolonial Belanda (abad ke-16 M hingga awal abad ke-19 M serta awal-pertengahan abad ke-19 M hingga awal-pertengahan abad ke-20 M). Bermula dari suatu permasalahan yang sepele hingga berujung kerusuhan besar dan berdarah itulah yang terjadi pada masa pasca-Orde Baru (1966-1998) antara lain, di Poso, Sulawesi Tengah (konflik antara kaum Kristiani dan kaum Muslim, Desember 1998-Desember 2001); Ambon, Maluku (konflik antara kaum Kristiani dan kaum Muslim, Desember 1999-Februari 2002); Sambas, Kalimantan Barat (konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura, kurun 1999); Sampit, Kalimantan Tengah (konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura, Februari-Juni/Juli 2001); hingga yang terakhir Tarakan, Kalimantan Timur (konflik antara etnis Tidung dan etnis Bugis, Sulawesi Selatan, 27-29 September 2010).

Sama seperti dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, namun tidak menyangkut kasus berdarah yang terkait dengan rasialisme dan etnisitas lebih dalam, melainkan melihat sisi dalam kedua isu tersebut melalui majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 yang mengangkat sosok Soe Hok-gie. Pada edisi khusus majalah *Tempo* ini, sosok Soe Hok-gie diangkat cukup “dalam” melalui

liputan-liputan yang terkait dengan judul edisi tersebut: Gie dan Surat-surat Yang Tersembunyi (Majalah *Tempo*, 10-16 Oktober 2016). Edisi khusus inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai sepak terjang sosok pemuda Tionghoa itu kurun 1960-an, melalui liputan-liputan yang ditulis majalah *Tempo* itu—termasuk bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu dan suasana di balik pergantian Orde Lama (1959-1965) menuju Orde Baru (1966-1998).

Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 ini terbagi ke dalam tiga judul utama, tiga judul artikel utama, dan empat-lima sub-judul artikel inti. Berikut ini merupakan tiga judul utama, judul artikel, dan empat-lima sub-judul artikel majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016

Tabel 3.1

| No. | Judul Artikel | Judul Artikel Utama | Sub-Judul Artikel Inti |
|------------|----------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ideologi-Inspirator | “Komunis dan Map Hijau” | “Burung Tanpa Kaki”; “Strategi Liar Seorang Demonstran”; “Rahasia dalam Map Hijau”; “Gusar di Tengah Pembantaian”; |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | dan “Mengeras di Negeri Abang Sam” |
| 2 | Profil | “Cinta, Gunung, dan Film” | “Buah Tak Jatuh dari Babah”; “Remaja Bercelana Pendek Bervisi Panjang”; “Tiga Asmara Berakhir di Pendakian”; “Anak Gunung Nomor 007”; dan “Gie ala Mira-Riri” |
| 3 | Gerakan Mahasiswa | “Pena, Megafon, dan Semeru” | “Pengkritik Bung Besar”; “Penyumbang Ide dan Tokoh Lapangan”; “Gincu dan Kutang Untuk |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Teman Seperjuangan”; dan “Firasat Mimpi Tiga Mayat” |
|--|--|--|---|

Tabel 3. 1 Judul Utama, Judul Artikel, dan Sub-judul Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016

Berdasarkan tabel di atas, penulis mengambil dua sub-judul artikel dari masing-masing tiga artikel di atas untuk diteliti lebih lanjut serta menggunakan teknik analisis wacana kritis Norman Fairclough (intertekstualitas atau analisis mikro teks; keterangan: **cetak tebal** pada tabel di atas merupakan bagian utama yang akan diteliti oleh penulis). Ada dua alasan utama mengapa penulis mengangkat penelitian dalam enam artikel tersebut. *Pertama*, karena sosok Soe Hok-gie yang seorang berketurunan Tionghoa merupakan tokoh sentral yang memainkan perannya bagaikan dua sisi mata koin yang saling berlawanan: idealis-humanis serta kritis dan berasal dari kalangan minoritas—yang pada masa itu sentimen-sentimen berbau negatif kerap kali diarahkan kepada kalangan minoritas. *Kedua* (atau yang terakhir), situasi dan kondisi di Indonesia saat itu (sepanjang 1960-an) dan kini (selama 2000-an hingga 2010-an) hampir serupa. Sebab, kalangan minoritas, khususnya etnis Tionghoa, mulai menampakkan diri mereka seiring dengan berjalannya waktu. Jika ditarik kembali pada masa kolonial

Hindia Belanda (1816-1942) hingga Orde Lama (1959-1965) [catatan: kecuali zaman pendudukan militer Jepang (1942-1945); yang mana etnis Tionghoa menjadi sasaran “amarah dan amukan” rezim Jepang pasca-invasi militer ke Nanking (1937-1938)], kalangan minoritas tak sungkan-sungkan untuk berani menampakkan jatidiri mereka sebagai bagian dari negara Indonesia. Selepas Orde Lama (1959-1965) yang kemudian digantikan tiga periode setelahnya—Orde Baru (1966-1998), pasca-Orde Baru alias Reformasi (1998-2004) dan pasca-Reformasi (2004-sekarang)—kalangan minoritas seolah-olah kehilangan gairah untuk kembali menampakkan diri mereka di depan publik. Isu “gerakan kiri” yang ditujukan kepada mereka-lah alasan utama etnis Tionghoa tak berani menampakkan dirinya. Namun, sebagian dari mereka tetap bangga sebagai bagian dari warga Indonesia dan menampilkan pelbagai “prestasi” di segala bidang: hiburan (*entertainment*), olahraga, ekonomi dan bisnis, hingga sosial-politik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang menggunakan pendekatan tiga dimensi utama, yakni dimensi teks, dimensi praksis diskursif, dan dimensi praksis sosio-kultural.

Dalam dimensi teks, penulis akan menganalisis tingkat keahasaannya (seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab I) yang meliputi: analisis judul artikel dan analisis kalimat dalam artikel liputan. Kemudian dalam dimensi praksis diskursif atau praksis wacana (seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab I), penulis akan menganalisis kewacanaan dalam setiap kalimat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pernyataan tersebut dapat mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Terakhir dalam dimensi praksis sosio-

kultural (seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab I), penulis akan memberi gambaran mengenai bagian aktivitas sosial dalam praksis, di mana hal ini didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang berada di luar media sebenarnya dapat memengaruhi penulis membentuk wacana yang ada di dalamnya.

Dalam proses analisis ini, penulis akan meneliti satu persatu liputan yang telah ditulis pada tabel di atas (lihat Tabel 3.1) untuk dianalisis dan masing-masing judul artikel serta sub-judul artikel akan diteliti menggunakan tiga dimensi utama Fairclough: teks, praksis diskursif, dan praksis sosio-kultural. Pertama, penulis akan menganalisis artikel dan sub-artikel menggunakan dimensi teks, di mana setiap sub-artikel penulis menganalisis menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat pada paragraf yang terdapat dalam teks artikel mulai dari judul artikel, koherensi pada kata dan kalimat, hingga posisi penulis dalam penulisan artikel. Kedua, penulis akan meneliti menggunakan dimensi praksis diskursif (praksis wacana), di mana setiap teks dan tata bahasa yang digunakan tentunya mendapat konfirmasi langsung kepada para penulis artikel terkait (wartawan yang meliput atau menulis) untuk memberikan penjelasannya terhadap penggunaan istilah dalam kata atau kalimat pada teks liputannya.

Terakhir, penulis akan meneliti menggunakan dimensi praksis sosio-kultural. Dalam dimensi ini, wacana penulis akan semakin terlihat dan ini merupakan bagian terpenting dari terbongkarnya sebuah wacana artikel terkait rasialisme dan etnisitas yang telah diteliti. Dalam dimensi praksis sosio-kultural ini, didasarkan pada fenomena sosial yang dapat memengaruhi wacana dalam

artikel terkait rasialisme dan etnisitas. Mulai dari sistem ekonomi, sistem pemerintahannya serta fenomena-fenomena lainnya yang mampu memengaruhi pelaku media untuk menentukan wacana yang cocok dalam artikel itu.

B. Analisis Dimensi Teks Artikel dalam Majalah *Tempo*

Dalam dimensi teks ini, penulis akan menganalisis penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan penulis artikelnya. Di analisis pertama ini, penulis akan secara teliti dan detail penggunaan kata dalam setiap teksnya. Di sini, penulis dituntut untuk selalu fokus pada kata dan kalimat dalam artikel agar tidak luput dari pengamatan penulis selama penelitian ini berlangsung.

Catatan: **“Komunis dan Map Hijau”** terdiri atas lima sub-judul artikel: **“Burung tanpa Kaki”**, **“Strategi Liar Seorang Demonstran”**, **“Rahasia dalam Map Hijau”**, **“Gusar di Tengah Pembantaian”**, dan **“Mengeras di Negeri Abang Sam”** (keterangan: cetak tebal miring merupakan *bagian utama* yang diteliti oleh penulis)

1. “Gusar di Tengah Pembantaian” (Artikel: “Komunis dan Map Hijau”)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Penulis membuka penelitian awal (bagian pertama – pen) dengan membahas sub-judul pertama dalam artikel ini. Artikel pertama ini lebih menguatkan pada sisi emosional Soe Hok-gie yang

dituangkan ke dalam tulisan-tulisannya di pelbagai media massa, termasuk majalah kampus. Aksi “pembersihan” massal terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya kurun Oktober 1965 hingga Maret-April 1966 membuat hatinya terkejut. Hok-gie, dalam artikel-artikel yang ia tulis, “bercerita” mengenai aksi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota anggota PKI dan *onderbouw*-nya kurun Oktober 1965 hingga Maret-April 1966 yang terjadi di Jawa-Bali (difokuskan pada dua lokasi, yakni Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali), Oktober 1965 hingga Maret-April 1966 sekaligus mengungkapkan sisi hatinya yang (agak) berlawanan dengan apa yang tak seharusnya dilakukan seusai tragedi berdarah G30S/PKI. Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel pertama ini, penulis menemukan setidaknya satu-tiga kalimat yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya sekaligus menarik dianalisis lebih dalam (artikel terakhir di bawah – pen)

(**K¹**) Pertanyaan untuk korban senada: apakah mereka **ikut PKI**? (Tempo, 2016: 56)

(**K²**) Penginterogasi pun hanya mau mendengar jawaban “iya”. Jika tidak menjawab, korban **disiksa**. Siksaannya mengerikan. Tahanan laki-laki **disetrum kemaluannya**. Yang perempuan akan **disetrum buah dadanya**. Ujungnya

mereka hampir pasti mengiyakan karena tak tahan (Tempo, 2016: 56)

(**K³**) “Atas dasar pengakuan ini, mereka **dihukum mati**”, tulis Hok-gie (Tempo, 2016: 56)

Pada kalimat pertama hingga ketiga, merupakan kalimat yang saling bersinggungan (berkaitan) antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kata dalam kalimat pertama (**K¹**), yakni kata **ikut PKI**, menunjukkan asumsi (dugaan) bahwa para tahanan yang dibawa ke ruang interogasi “disuruh dan dipaksa” untuk mengakui bahwa mereka ikut terlibat dalam keanggotaan (baik organisasi resmi atau organisasi *onderbouw*/organisasi bawahan) Partai Komunis Indonesia (PKI). Penginterogasian ini dilakukan selama operasi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya di Jawa, Bali dan (sebagian) Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga (sebagian) Nusa Tenggara, Maluku serta Papua, kurun Oktober 1965 hingga Maret-April 1966. Namun, operasi yang paling penting adalah operasi yang dilakukan di Jawa dan Bali. Sebab, sisa-sisa anggota PKI masih tersebar di kedua pulau tersebut sejak 1965-an hingga awal-pertengahan 1966.

Konteks **ikut PKI** adalah konteks yang seolah-olah memaksa mereka untuk mengakui keterlibatan dalam PKI. Padahal belumlah tentu mereka ikut terlibat, baik dalam G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI. Azas praduga tak bersalah dalam konteks ini memang terlihat

jelas dan sekali-kali menegaskan bahwa aksi ini merupakan “balas dendam” dari aksi G30S/PKI yang menewaskan tujuh prajurit (enam jenderal dan satu perwira) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomihardjo, Mayor Jenderal Donald Izacus Pandjaitan, dan Kapten Pierre Andreas Tendean) pada malam kelabu 30 September-1 Oktober 1965 tersebut.

Kemudian, kata pada kalimat kedua (*K*²), yakni **disiksa**, **disetrum kemaluannya**, dan **disetrum buah dadanya** menunjukkan konteks bahwa penginterogasian tersebut diselingi dengan penyiksaan untuk “memaksa” para tahanan “buka mulut” atas keterlibatan mereka dalam aksi G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI. Konteks ini bersinggungan dengan konteks sebelumnya, yakni penginterogasian terhadap tahanan-tahanan yang diduga terlibat dalam aksi G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI. Seperti yang telah dibahas dalam konteks pada paragraf di atas, konteks ini juga ingin membuktikan bahwa aksi penyiksaan terhadap mereka yang terlibat dalam aksi G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI sebagai bentuk “balas dendam” terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada tujuh prajurit (enam jenderal dan satu perwira) TNI AD (nama-nama mereka telah disebut di paragraf sebelumnya – pen) dalam aksi G30S/PKI.

Kata **disiksa**, **disetrum kemaluannya**, dan **disetrum buah dadanya** di atas merupakan konteks yang berlawanan jauh dengan kemanusiaan, meskipun aksi penginterogasian dan penyiksaan terhadap tujuh prajurit TNI AD (enam jenderal dan satu perwira) oleh oknum G30S/PKI tersebut, menurut Ariel Heryanto dalam buku *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar di Indonesia* (2015), merasa “dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan” dalam konteksnya guna memancing sisi emosional dan kebencian yang kuat terhadap PKI dan *onderbouw*-nya (Heryanto, 2015: 121, catatan kaki nomor 8 dan 9). Perlu dicatat pula bahwa saat terjadinya aksi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya, aksi tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto (Presiden RI ke-2, 1966-1998), tokoh “sentral” dalam dua versi yang saling berkaitan: versi nyata (aksi “sapu bersih” terhadap sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya, Oktober 1965 hingga Maret-April 1966) dan versi film (*Pengkhianatan G30S/PKI*, Arifin C Noer, 1984) dan diperankan oleh almarhum Amoroso Katamsi—yang juga memerankan tokoh serupa dalam film *Djakarta 1966* (Arifin C. Noer, 1982) dan *Di Balik 98* (Lukman Sardi, 2015) (Heryanto, 2015: 118 dan 121, catatan kaki nomor 8 dan 9).

Terakhir, kata dalam kalimat ketiga (**K³**), yakni kata **dihukum mati**, menunjukkan konteks bahwa akhir dari penginterogasian dan penyiksaan terhadap para tahanan yang diduga terlibat dalam aksi G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI adalah akhir yang

mengejutkan. Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh prajurit (enam jenderal dan satu perwira) TNI AD dalam suatu gerakan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia” (G30S/PKI) merupakan puncak dari rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang berbau komunisme, sejak pemberontakan 1926-1927 (Catatan: pemberontakan ini melawan kolonial Belanda dan tidak digolongkan sebagai pemberontakan, sebab ketika itu Indonesia belum berdiri; Mei 1926 hingga awal-pertengahan 1927), pemberontakan 1948 (Peristiwa Madiun atau “Madiun Affair”, 18-19 September 1948), hingga pemberontakan 1965 (G30S/PKI, 30 September-1 Oktober 1965). Bahkan hingga sekarang pun masyarakat Indonesia masih “alergi” terhadap hal-hal yang berbau komunisme, baik dalam bentuk lambang, logo, tulisan maupun non-verbal lainnya (Heryanto, 2015: 124-127)

Konteks **dihukum mati** pada kata dalam paragraf di atas ingin menunjukkan bahwa aksi G30S/PKI yang dilakukan oleh PKI dan *onderbouw*-nya terhadap tujuh prajurit (enam jenderal dan satu perwira) TNI AD tersebut ingin “dibalas lebih keji, kejam, dan brutal” terhadap para tahanan sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya yang terlibat dalam aksi G30S/PKI atau aksi-aksi di luar (sebelum) G30S/PKI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice/ICJ), Amnesti Internasional (Amnesty International) serta “laporan khusus” Badan Intelijen Pusat

(Central Intelligence Agency) milik AS, mencatat, aksi “sapu bersih” ini mungkin hampir menyamai atau telah melebihi kekejian, kekejaman, dan kebrutalan pada aksi “sapu bersih” era Joseph Stalin di Uni Soviet (1930-an, sekitar 1936 hingga 1938, atau “The Great Purge”) atau aksi Holocaust oleh Nazi Jerman terhadap sisa-sisa etnis Yahudi Eropa maupun non-Eropa di Jerman dan Polandia (1940-1945). Dan yang tidak manusiawi lagi terlebih setelah aksi ini berakhir, yang masih hidup diasingkan ke Pulau Buru, Maluku (1967-1977) dan dicabut dari keterlibatan serta hak politiknya selama rezim Orde Baru (1966-1998) maupun rezim pasca-Orde Baru (1998-sekarang) (Catatan: meskipun telah “dipulihkan”, namun sebagian dari mereka enggan lagi terjun ke dunia politik, baik pada masa pemilihan umum presiden, pemilihan legislatif, atau pemilihan kepala daerah).

Aksi kejam PKI dan *onderbouw*-nya terhadap masyarakat yang menentanginya (termasuk umat Islam – pen), baik di Jawa maupun di luar Jawa, bermula pada masa pemberontakan 1948. Madiun, Ponorogo, Kediri dan sekitarnya (merembet hingga ke Surakarta – pen), menjadi “saksi bisu” atas *clash and chaos* (bentrokan dan kekacauan) antara Divisi Siliwangi dan pasukan pro-PKI selama Madiun Affair (18-19 September 1948). Di Takeran, Magetan, Jawa Timur, ratusan atau hampir mencapai ribuan warga Takeran hingga sekitarnya, termasuk santri Pondok Pesantren Sabilul Muttaqien dan pengasuhnya, tewas dibantai oleh PKI (Heryanto, 2015: 130-131). Kemudian, tiga belas tahun setelah

pemberontakan 1948 dan sebelum meletus aksi G30S/PKI, sekitar Januari-Februari 1965, di Kanigoro (adapula yang menulis Panigoro – pen), Kediri, Jawa Timur, terjadi aksi serupa terhadap ratusan hingga ribuan warga (termasuk kaum muslim yang mengikuti acara kilat Pelajar Islam Indonesia/PII) setempat oleh PKI (Heryanto, 2015: 121, catatan kaki nomor 8 dan 9).

2. “Mengeras di Abang Sam” (Artikel: “Komunis dan Map Hijau”)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Terakhir, penulis menutup penelitian awal (bagian pertama – pen) dengan membahas sub-judul terakhir dalam artikel ini. Artikel terakhir ini lebih menguatkan sisi etnisitas dan rasialisme yang telah dibahas dalam Bab I (dan Bab II). Artikel ini banyak menceritakan bagaimana Hok-gie menghadapi isu etnisitas dan rasialisme di Amerika Serikat kurun 1960-an, yang ketika itu tengah “memanas” akibat pergesekan antara kaum keturunan Afro-Amerika dan kulit putih dan membandingkannya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Analisis dalam artikel ini justru lebih “menguatkan” dalam pembahasan pada Bab I (dan Bab II) dan penulis juga dapat membandingkannya melalui analisis film *Forrest Gump* (1993) yang disutradarai Robert Zemeckis, yang (sebagian) “bercerita” mengenai isu etnisitas dan rasialisme yang tengah memanasi pada kurun 1960-an dan digambarkan melalui adegan persahabatan antara Forrest Gump (Tom Hanks)–tokoh utama dalam film tersebut–dan Benjamin Buford “Bubba”

Blue (Mykelti Williamson), warga berketurunan Afro-Amerika yang memiliki keinginan membuka usaha peternakan udang se usai Perang Vietnam. Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel terakhir ini, penulis menemukan setidaknya satu-tiga kalimat yang saling bersinggungan dengan inti dari skripsi ini, yakni berkaitan (dengan isu) rasialisme dan etnisitas,

(*K*¹) Hok-gie menjelaskan **sikapnya terhadap politik Amerika Serikat**. “**Saya anti-Perang Vietnam**”, begitu Hok-gie menuliskan cerita dalam risalahnya. “**Saya Bukan Wakil KAMI**”. “(Saya) **antikomunis**, tapi saya juga **memprotes keadaan tak adil untuk mereka.**” (Tempo, 2016: 58)

(*K*²) Hok-gie, misalnya, bercerita tentang pertemuannya dengan seorang tokoh gerakan persamaan hak warga negara, English Bradshaw. Dari Bradshaw, Hok-gie mendapat gambaran bagaimana **pemisahan dan perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit** masih menonjol di Amerika Serikat (Tempo, 2016: 58)

Pada kalimat yang pertama (*K*¹), penulis menemukan setidaknya empat kata yang menurut penulis saling berkaitan antara satu dengan lain.

Kata-kata itu antara lain, **sikapnya terhadap politik Amerika Serikat, “Saya anti-Perang Vietnam”, antikomunis, dan memprotes keadaan tak adil untuk mereka.** Kata pertama dan kedua, yakni **sikapnya terhadap politik Amerika Serikat dan “Saya anti-Perang Vietnam”** merupakan konteks awal dari apa yang diungkapkan oleh Hok-gie, baik melalui tulisannya ataupun apa yang ia alami, rasakan, dan lihat sendiri ketika menjalani misi pertukaran pelajar ke AS, Agustus-Desember 1968. Hok-gie memang dikenal dengan sosok yang *idealis murni* dan (bukan) sosok yang munafik, “tak seperti Paduka Yang Mulia (Sukarno – red) serta menteri-menterinya yang gila jabatan dan sontoloyo” (Hok-gie, 1983: 69-71)

Saat itu, Perang Vietnam (1955-1975) tengah berkecamuk dan pada masa 1960-an merupakan puncaknya konflik antara Vietnam Utara (yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok) serta Vietnam Selatan (Republik Vietnam Selatan, yang didukung oleh AS serta negara-negara Barat lainnya) itu. Periode itu dikenal dengan Perang Dingin (1947-1991, dan sedang memasuki episode ke-III, 1961-1973). Politik AS yang memanas dengan Uni Soviet sepanjang 1950-an mulai memengaruhi posisi AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Bersama Perancis, Inggris, Uni Soviet (kini Rusia – pen) dan Tiongkok, AS memprakarsai berdirinya PBB dua tahun sebelum meletus Perang Dingin, 24 Oktober 1945.

Penggunaan kata pada kalimat pertama di atas, yakni **sikapnya terhadap politik Amerika Serikat**, dan **“Saya anti-Perang Vietnam”** memang sesuai dengan situasi dan kondisi di masa itu (1960-an) dan bisa jadi digunakan di masa kini, sebab Uni Soviet mulai digantikan Rusia yang makin “berjaya” di depan AS dan sekutu-sekutu Barat-nya. Jika ditarik ke masa empat-enam dasawarsa silam, kekuatan dunia terbagi menjadi dua, AS (kapitalisme-liberalisme) dan Uni Soviet (sosialisme-komunisme). Kekuatan yang kedua (Uni Soviet – pen), menurut Eric Arthur Blair (atau yang dikenal dengan nama pena **George Orwell**, 1903-1950) dalam novel distopia fenomenalnya, *Nineteen Eighty-Four* (1949), digambarkan sebagai “kekuatan yang mengerikan”. Maka, penggunaan kata dan istilah pada kalimat di atas (kecuali **“Saya anti-Perang Vietnam”** – pen) sudah sesuai dengan konteks situasi dan kondisi ketika itu (Perang Dingin, dasawarsa 1960-an, dan lain-lain) dan boleh-boleh saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Kemudian, kata ketiga dan keempat pada kalimat pertama (**K¹**), yakni **antikomunis** dan **memprotes keadaan tak adil untuk mereka**, menunjukkan konteks bahwa Hok-gie, meskipun berasal dari etnis Tionghoa yang pada masa-masa itu dikait-kaitkan dengan Tiongkok dan komunis, bukan seorang komunis dan antikomunis. Meskipun antikomunis, Hok-gie juga gerah dengan apa yang terjadi kurun Oktober 1965 hingga Maret-April 1966. Aksi “sapu bersih” terhadap eks sisa-sisa anggota PKI dan *onderbouw*-nya di Jawa dan Bali—termasuk sebagian

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga (sebagian) Maluku dan Papua—membuat hatinya masygul. Etnisnya, etnis Tionghoa, juga dituduh sebagai kaki tangan Partai Komunis Tiongkok (PKT)—yang saat itu “menjalin” relasi hangat dengan Presiden Sukarno sekaligus membentuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang-Moskow, bersama Uni Soviet dan Korea Utara.

Makna **antikomunis** dan **memprotes keadaan tak adil untuk mereka** juga memberikan konteks penegasan bahwa situasi dan kondisi ketika itu memang sedang “panas” antara blok Barat (AS dan sekutu-sekutu Barat-nya) dan blok Timur (Uni Soviet dan sekutu-sekutu sosialis-komunisnya).

Kemudian, kata yang terdapat pada kalimat kedua (**K²**), yakni **pemisahan dan perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit** adalah konteks yang menunjukkan bahwa diskriminasi rasial yang terjadi di AS sedang berada di puncaknya sejak diberlakukannya Undang-undang Anti Perbudakan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS pada pertengahan abad ke-19 M. Kasus diskriminasi rasial di AS sudah lama terjadi. Puncaknya terjadi pada 1960-an, ketika Perang Dingin (1947-1991) juga sedang berada di puncaknya. Dua aktivis dan pembela hak-hak kaum Afro-Amerika, Malcolm X (El-Hajj Malik El-Shabazz, Islam; dan salah satu tokoh kunci *Nation of Islam* bersama Elijah Muhammad) dan Martin Luther King, Jr., (Kristen), terbunuh dalam rentang waktu yang hampir berdekatan, 1965 dan 1967. Pembunuhan dua aktivis dan pembela

hak-hak kaum Afro-Amerika itu memicu panasnya perpolitikan AS kurun 1960-an hingga 1970-an.

Produksi perfilman terbesar di dunia, Hollywood, juga mulai mengangkat isu rasialisme dan etnisitas ke dalam industri perfilman mereka kurun 1970-an atau selepas Perang Vietnam (1955-1975) berakhir, terutama yang berkaitan Afro-Amerika. Salah satunya ialah film *Forrest Gump* (1993)—yang diangkat dari novel yang berjudul sama (*Forrest Gump*, 1986) dan mengambil *setting* akhir 1930-an hingga 1993 (ketika film tersebut diproduksi)—garapan sutradara Robert Zemeckis.

Salah satu narasi dalam film tersebut yang mengangkat isu rasialisme dan etnisitas terdapat di adegan awal sekaligus menampilkan peristiwa bersejarah: diperbolehkannya pelajar Afro-Amerika masuk dan berbaur di sekolah yang sama pada 1960-an. Kemudian, Forrest Gump (Tom Hanks) melihat tas yang dibawa siswa itu tak sengaja terjatuh, lalu mengambil serta menyerahkannya. Aksi itu dipandang sebelah mata oleh kaum kulit putih yang seolah-olah “Gump membela kaum kulit hitam” (sebelum istilah Afro-Amerika diperkenalkan pada pertengahan 1960-an). Lalu pada adegan selanjutnya, Gump bertemu seorang warga Afro-Amerika bernama Benjamin Buford “Bubba” Blue (Mykelti Williamson), yang kebetulan sama-sama mendaftar sebagai tentara AS untuk Perang Vietnam (1955-1975). Selama menjalani masa pendidikan dan pelatihan hingga diterjunkan ke medan perang, Bubba selalu menceritakan keinginannya untuk membuka usaha peternakan udang seusai Perang

Vietnam (1955-1975). Namun dalam sebuah pertempuran di belantara Vietnam, Bubba terbunuh dan Gump menjadi satu-satunya yang mendengarkan keinginan Bubba untuk terakhir kali: impian mendirikan usaha peternakan udang. Impian itu dikabulkan oleh Gump dan mantan atasannya di Angkatan Darat AS, Dan Taylor (Gary Sinise), yang diperlihatkan di tengah-akhir adegan film.

Konteks kata selanjutnya dalam kalimat kedua (**K²**), yakni kata **pemisahan dan perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit**—yang digunakan untuk mengganti istilah “diskriminasi rasial” (“rasialisme” atau “rasisme”)—hingga kini masih dipergunakan di pelbagai media-massa, dan oleh sebagian wartawan menggunakan konteks itu untuk menggambarkan situasi dan kondisi sesuai konteks tersebut, baik di masa silam maupun di masa kini. Di AS, isu serupa sudah menjadi “makanan” sehari-hari—antara kaum Afro-Amerika dan kulit putih, hispanik (keturunan Spanyol atau Latin) dan kulit putih, imigran Muslim dan kulit putih, dan sebagainya—hingga menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran yang berakhir keributan. Kejadian serupa (kasus “diskriminasi rasial”) yang terakhir terjadi di AS pada 9-25 Agustus 2014 dan berlokasi di Ferguson, Missouri, AS.

Catatan: “**Cinta, Gunung, dan Film**” terdiri atas lima sub-judul artikel, “**Buah Tak Jatuh dari Babah**”, “**Remaja Bercelana Pendek Bervisi Panjang**”, “**Tiga**

Asmara Berakhir di Pendakian”, “Anak Gunung Nomor 007”, dan “Gie ala Mira-Riri” (keterangan: cetak tebal miring merupakan *bagian utama* yang diteliti oleh penulis)

1. “ Buah Tak Jatuh dari Babah” (Artikel: “Cinta, Gunung, dan Film”)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Penulis membuka penelitian awal (bagian kedua – pen) dengan membahas sub-judul pertama dalam artikel ini. Artikel ini mengangkat kisah yang tak terungkap (*the untold story*) dalam kehidupan sosok Soe Hok-gie. Diawali dari “konflik” dengan sang adik, Jeanne Sumual (68 tahun), hanya beberapa jam sebelum kepergian Hok-gie ke Gunung Semeru sekaligus menjadi perjalanan terakhirnya. Artikel ini juga mengupas kisah-kisah yang “sebagian” terungkap dalam catatan harian Hok-gie, “*Catatan Seorang Demontran* (CSD, 1983), serta dijelaskan pula dalam buku karangan rekan-rekan mendiang Hok-gie, *Sekali Lagi Hok-gie.....Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya* (2009). Bagaimana kehidupan keluarga Hok-gie yang tak “diceritakan” dalam *Catatan Seorang Demontran* (1983)–namun justru “diceritakan” pula dalam buku karangan rekan-rekan mendiang Hok-gie, *Sekali Lagi Hok-gie.....Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya* (2009). Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel pertama ini, penulis setidaknya menemukan satu-dua kalimat yang saling bersinggungan antara satu kalimat ke kalimat lainnya sekaligus menarik untuk dianalisis lebih dalam

(*K¹*) Usia keduanya terpaut enam tahun. Hok-gie lahir pada 17 Desember 1942. Hok-gie kakaknya langsung, sehingga Jeanne **merasa lebih dekat** dengan dirinya dibanding kakak-kakak lainnya, termasuk Soe Hok-djin alias Arief Budiman. Apalagi keduanya **berbagi kamar**. “Dia sering bercerita tentang kisah cintanya”, kata Jeanne. (Tempo, 2016: 62)

(*K²*) “Keluarga Soe Lie-piet memang tak terlalu **menonjol**. “Mereka **bukan Cina miskin**, tapi **bukan juga Cina “wah”**. **Pas-pasan**”, ujar Herman Onesimus Lantang, sahabat Hok-gie yang acap bermain ke rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. (Tempo, 2016: 62)

Pada potongan kalimat pertama (*K¹*) di atas, terdapat kata-kata yang dicetak tebal, yakni **merasa lebih dekat** dan **berbagi kamar**. Kata-kata itu menunjukkan sisi emosional seorang, antara seorang kakak terhadap seorang adik, terlebih jika rentang kakak tersebut terpaut jarak yang cukup dekat (antara dua hingga enam tahun lebih tua). Sisi emosional yang ditulis dalam artikel di atas merupakan sisi emosional

seorang yang benar-benar kehilangan sosok yang paling dekat dengan dirinya.

Kata **merasa lebih dekat** dan **berbagi kamar** menunjukkan bahwa Soe Hok-gie dan Jeanne Sumual, adik perempuannya, memiliki kedekatan yang cukup emosional. Sebab, dalam penuturan Jeanne pada artikel itu, ia menceritakan secara detail bagaimana sosok Soe Hok-gie yang sebenarnya, dan ikut pula memberikan gambaran tentang mendiang sang kakak dalam artikel “Gie ala Mira-Riri” (keterangan: bagian ini seharusnya akan dibahas nanti, namun tidak dapat dibahas karena keterbatasan situasi dan kondisi – pen). Kata **merasa lebih dekat** yang digunakan dalam artikel itu juga menunjukkan bahwa Hok-gie mengenal dan dikenal sangat dekat oleh Jeanne, ataupun sebaliknya: Jeanne lebih mengenal Hok-gie cukup dekat daripada kakak-kakak lainnya, terutama Soe Hok-djin (alias Arief Budiman).

Kata **berbagi kamar**, menunjukkan makna mendukung pernyataan sebelumnya dan mewakili sisi emosional. Hok-gie, seperti yang ditulis dalam buku *Sekali Lagi Hok-gie.....Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya* (2009), dikenal selalu mencurahkan hatinya kepada orang terdekat, termasuk sang adik, Jeanne. Kamar Hok-gie dan Jeanne, bersama Arief, digabung menjadi satu, dan terpisah dari dua kakak perempuan lainnya, Dien dan Mona (pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II – pen).

Pada kalimat kedua (**K²**) di atas, terdapat kata-kata yang dicetak tebal, yakni **menonjol, bukan Cina miskin, bukan juga Cina “wah”, dan pas-pasan**. Kata pertama hingga terakhir itu memiliki makna jika keluarga Soe Hok-gie bukan keluarga Tionghoa yang dikenal luas, meskipun nama Soe Hok-gie dan Arief Budiman (Soe Hok-djin) justru yang dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia hingga kini. Seperti yang dibahas dalam Bab II, Soe Lie-piet merupakan pria yang bekerja sebagai jurnalis dan penulis cerita anak-anak (namun dalam Bab II lebih ditonjolkan pekerjaan utama Lie-piet sebagai jurnalis – pen).

Soe Lie-piet memang hidup dalam kondisi keuangan yang boleh dikatakan sama seperti tiga kata terakhir di atas. Bukan keluarga Tionghoa kelas atas dan bukan pula keluarga Tionghoa kelas bawah. Melainkan memiliki kehidupan yang layak. Perekonomian Lie-piet dan keluarga juga lancar. Meskipun begitu, kedua anaknya, Hok-gie dan Hok-djin (Arief), tumbuh menjadi pemuda intelektual di zaman itu. Jadi, keluarga Hok-gie (yang menurut stereotipe masyarakat pribumi terhadap etnis minoritas, khususnya Tionghoa) bukan dipandang sebagai pedagang dan pebisnis, sebagaimana stereotip terhadap etnis Tionghoa lainnya. Melainkan, berani “melawan” arus deras terhadap stereotipe-stereotipe pada masa itu yang telah dianggap melekat sejak masa pra-kolonial Barat (abad ke-4 M hingga abad ke-15 M), kolonial Barat (abad ke-15 M hingga awal abad ke-19 M) dan awal abad ke-19 M hingga awal-

pertengahan abad ke-20 M), dan pasca-kolonial Barat (awal-pertengahan abad ke-20 M hingga sekarang).

Stereotipe pribumi Indonesia terhadap etnis Tionghoa sudah dibahas sebelumnya dalam Bab I. Stereotipe terhadap etnis Tionghoa di mata pribumi Indonesia, yakni bahwa mereka (etnis Tionghoa – pen) memang diidentikkan dan dikaitkan dengan dunia perekonomian, termasuk perdagangan, sudah lama terjadi, bahkan sejak masa awal kekaisaran Tiongkok Daratan (Suryadinata, 2002: 120-121).

2. “Remaja Bercelana Pendek Bervisi Panjang” (Artikel: “Cinta, Gunung, dan Film”)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Terakhir, penulis menutup penelitian awal (bagian kedua – pen) dengan membahas sub-judul terakhir dalam artikel ini. Artikel ini lebih banyak mengangkat awal mula sikap “memberontak” Hok-gie yang mulai tumbuh saat menempuh sekolah menengah (Sekolah Menengah Pertama Strada II dan Sekolah Menengah Atas Kanisius)– dan lebih menonjol ketika ia sadar jika ketidakadilan sudah terjadi. Perlawanannya atas ketidakadilan mulai nampak dalam artikel ini, dimulai dengan mengirim tulisannya ke majalah sekolah hingga berdebat dengan gurunya sendiri–yang saat itu dianggap tabu (pantangan). Visioner Hok-gie muncul, seperti yang ditulis dalam

artikel ini, seiring dengan ketidakadilan yang datang silih berganti hingga ia menulis catatan yang dikenal sebagai awal-mula jiwa perlawanan dan pemberontakannya pada ketidakadilan (dapat dilihat di Bab II – pen). Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel terakhir ini, penulis setidaknya menemukan satu-dua kalimat yang saling bersinggungan antara satu kalimat ke kalimat lainnya sekaligus menarik untuk dianalisis lebih dalam

(*K*¹) Menurut kakak Hok-gie, Arief Budiman, yang juga bersekolah di sana, dan ibu mereka, Nie Hoei-an, nilai ujian negara beberapa mata pelajaran Hok-gie saat SMP **sangat baik**, sehingga dia mendapat tempat di sana, meskipun keluarganya **miskin**. (*Tempo*, 2016: 64)

(*K*²) Gara-gara tulisan yang **terlalu tinggi** ini pula, Frans urung mengajak Hok-gie *ngobrol*. Dia (Frans – pen) sudah minder *duluan* dan merasa tak menemukan topik yang pas untuk mereka diskusikan. (*Tempo*, 2016: 64)

Dalam kalimat pertama (*K*¹) terdapat dua kata yang menjadi kata *penegas* pada pembahasan sebelumnya, namun juga sebagai kata *pendukung*, yakni **sangat baik** dan **miskin**. Pada pembahasan sebelumnya, kata **miskin** amat kontras dengan kata **bukan Cina**

miskin, bukan juga Cina “wah”, dan pas-pasan, meskipun *didukung* pula dengan pernyataan dalam pembahasan sebelumnya. Kata **miskin** tentu menggambarkan situasi dan kondisi yang tak memiliki apapun, baik barang-barang dari kalangan kelas atas maupun menengah. Dan, kata pendukung itu dinyatakan pula dalam pembahasan sebelumnya, yang menulis **bukan Cina miskin, bukan juga Cina “wah”, dan pas-pasan**. Sebab, kondisi perekonomian keluarga Hok-gie ketika itu amat berkecukupan.

Kemudian, kata **sangat baik** juga menjadi kata *penegas* sekaligus kata *pendukung* pada pembahasan sebelumnya (bagian awal pembahasan kedua ini – pen), yang sekali-kali menegaskan bahwa jikalau Hok-gie **miskin**, ia juga bisa menunjukkan prestasinya di bidang akademik, meskipun ia berasal dari golongan kelas menengah ke bawah. Sama halnya dengan sang kakak, Arief Budiman (Soe Hok-djin), yang juga memiliki prestasi baik di bidang akademik.

Lalu, pada kalimat kedua, terdapat kata **terlalu tinggi**, yang menggambarkan bahwa Hok-gie adalah sosok yang *intelektual, kritis*, serta *idealis murni*. Frans, salah seorang kawan mendiang Hok-gie yang menjadi narasumber dalam artikel ini, menyebut bahwa Hok-gie adalah sosok yang *cerdas* (istilah ini didasarkan pada paragraf pertama bagian ini – pen), *intelektual, kritis*, serta *idealis murni*. Dari kata-kata yang dicetak tebal di atas, itu dibuktikan jika jiwa perlawanan dan pemberontakannya terhadap ketidakadilan sudah mulai terlihat. Dari

tulisan-tulisan yang ia kirim ke majalah sekolah hingga perdebatannya dengan beberapa guru di SMA membuat namanya makin terkenal, bahkan ikut mengkritik pemerintah semasa ia kuliah—hanya beberapa tahun setelah lulus dari SMA.

Maka, banyak yang tidak heran jika nama Hok-gie dikenal luas, dan hampir seluruh Indonesia mengenalnya sebagai “tokoh oposisi yang paling “bersuara” keras” (jika dibandingkan dengan sikap oposisi pada masa Orde Baru hingga sekarang ini belum “sebanding” dengan sikap oposisi seorang Hok-gie). Kritikan tajam Hok-gie bahkan pernah mengantarkan dirinya kepada surat kaleng dari seorang pengidola Sukarno dan tulisan surat kaleng itu berisi “cacian dan hinaan yang berbau rasis” kepada dirinya, sebab Hok-gie adalah seorang Tionghoa.

Catatan: **“Pena, Megafon, dan Semeru”** terdiri atas empat sub-judul artikel, **“Pengkritik Keras Bung Besar”**, **“Penyumbang Ide dan Tokoh Lapangan”**, **“Gincu dan Kutang untuk Teman Seperjuangan”**, dan **“Firasat Mimpi Tiga Mayat”** (keterangan: cetak tebal miring merupakan *bagian utama* yang diteliti oleh penulis)

1. **“Pengkritik Keras Bung Besar”** (Artikel: **“Pena, Megafon, dan Semeru”**)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Penulis membuka penelitian awal (bagian ketiga – pen) dengan membahas sub-judul pertama dalam artikel ini. Artikel ini berisi sebagian dari apa yang dilakukan oleh Soe Hok-gie kurun 1960-an, termasuk menggerakkan aksi mahasiswa dalam demonstrasi 1966. Meskipun telah dijelaskan dalam dua artikel yang ditulis dalam artikel “Komunis dan Map Hijau”, tentu bagian ini justru “lebih detail dan jelas” dalam menyajikan sepaik terjang sosok pemuda berketurunan Tionghoa itu pada 1960-an, termasuk aksi demonstrasi 1966 (Dua artikel tersebut berjudul “Burung Tanpa Kaki” dan “Strategi Liar Seorang Demonstran”. Catatan: penulis memohon maaf jika tak sempat menjelaskan lebih detail dalam penelitian ini karena keterbatasan ruang dan waktu – pen). Apa yang ia lakukan selama aksi demonstrasi 1966 itu, mulai dari menggerakkan massa hingga bertemu dengan para politikus dan perwira militer loyalis maupun oposan Sukarno (selanjutnya dibahas dalam bagian “Penyumbang Ide dan Tokoh Lapangan”). Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel pertama ini, penulis setidaknya menemukan satu-dua kalimat yang saling bersinggungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan cukup menarik untuk dianalisis lebih dalam

(K¹) Menurut Josi Katoppo (Cornelis Joost “Josi” Katoppo, adik dari wartawan senior Aristides Katoppo – pen), ketika itu orang tak berani **menyebut** kepada Bung Karno. “Kalau menyebut Bung Karno **harus lengkap dengan gelarnya**, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Penyambung Lidah Rakyat”, katanya (Tempo, 2016: 76)

(K²) Posisi Hok-gie memang **pengkritik keras** Sukarno. Sebagai mahasiswa, ia telah tiga kali bertatap muka dan berdiskusi dengan Bung Karno. Ketika itulah Hok-gie melihat polah menteri-menteri yang ia nilai **suka menjilat** kepada Bung Karno (Tempo, 2016: 77)

Dalam kalimat pertama (K¹) di atas, terdapat dua kata-kata yang saling bersinggungan antara satu kata dengan lainnya, yakni **menyebut** dan **harus lengkap dengan gelarnya**. Konteks pada dua kata di atas tentunya sangat tepat serta berkaitan pada situasi ketika itu (tengah-akhir 1940-an hingga akhir 1990-an atau Perang Dingin, 1947-1991). Sebab, pada masa-masa itu atau ditarik lebih awal dari Perang Dingin (1947-1991) atau sekitar awal abad ke-20 M (atau abad ke-19 M ke atas), berkaitan dengan situasi demokrasi yang dipenuhi dengan para pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak (absolut, catatan: kecuali yang bersifat monarki atau kerajaan – pen), totaliter, hingga otoriter. Mulai dari Idi Amin (Uganda), Adolf Hitler (Nazi Jerman), Benito

Mussolini (Italia), Hirohito (Jepang, catatan: status raja Jepang yang disandangnya dipertanyakan, sebab Jepang terlibat dalam koalisi Axis bersama Nazi Jerman dan Italia selama Perang Dunia II, 1939-1945 – pen), dan pemimpin-pemimpin otoriter dan totaliter di belahan dunia lainnya kurun abad ke-20 M dan sebelumnya (abad ke-19 M ke atas).

Karena, dua kata di atas, yakni **menyebut** dan **harus lengkap dengan gelarnya**, merupakan salah satu bentuk “kecil” dari sikap otoriter dan totaliter dalam dunia demokrasi, dan berbanding jauh dari apa yang disebut sebagai jiwa seorang demokrat sejati. Konteks di atas memang tepat, sebab Sukarno (1901-1970) terpengaruh oleh situasional dan kondisional, di mana jiwa otoriter dan totaliter menguat, terlebih pasca-Perang Dunia II (1939-1945). Pengaruh dari negara-negara otoriter dan totaliter di masa-masa itu (1960-an dan ke atas), seperti Uganda, Nazi Jerman (Catatan: pasca-Perang Dunia II, Jerman “terbagi” menjadi dua: Jerman Barat, yang “dikuasai” oleh Amerika Serikat dan negara-negara blok Barat dan Jerman Timur, yang “dikuasai” oleh Uni Soviet dan negara-negara blok Timur – pen), Italia, hingga Uni Soviet dan Tiongkok, amat menentukan sikap demokrat “Sang Bung Besar”. Sebab, pengaruh itu juga makin memprihatinkan Indonesia yang baru berusia muda (sekitar 20-an tahun). Antara mungkin dan tak mungkin politik Indonesia terpengaruh oleh politik negara-negara yang bersifat otoriter dan totaliter.

Konteks dalam dua kata di atas sangat sesuai dengan situasi dan kondisi, karena saat itu Indonesia tengah “terpengaruh” oleh negara-negara yang menganut sistem otoriter dan totaliter. Posisi Indonesia pada masa itu memang lebih condong ke negara-negara yang menganut sistem otoriter dan totaliter, termasuk “romantisme” dengan sosialisme-komunisme yang menguat kurun 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Alhasil, Sukarno, yang awalnya bersikap tak memihak, justru makin lama makin terlihat goyah akibat kuatnya “romantisme” dengan sosialisme-komunisme kurun 1950-an hingga pertengahan 1960-an.

Dan, dua kata di atas, yakni **menyebut** dan **harus lengkap dengan gelarnya**, mungkin ditulis berdasarkan dari apa yang terjadi pada saat itu dan penulisnya (Soe Hok-gie atau wartawan yang melakukan liputan ini – pen) menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, bukan saat ini. Sebab, penafsiran konteksnya amat sangat berbeda antara saat itu (1960-an, Perang Dingin, dan lain-lain) dengan saat ini (2000-an hingga 2010-an) dan jika digunakan pada masa kini, hanya merujuk pada sebagian negara-negara yang menganut sistem otoriter dan totaliter saja yang masih bertahan (Catatan: negara terakhir yang menganut sistem otoriter dan totaliter adalah Zimbabwe yang presidennya, Robert Mugabe, merupakan pemimpin otoriter dan totaliter Zimbabwe yang memimpin selama 30 tahun dari 1987 hingga 2017).

Kemudian, pada kalimat terakhir atau kalimat kedua (**K²**), terdapat dua kata yang sangat bersinggungan dengan dua kata di atas dan juga saling bersinggungan antar satu dengan lain. Yakni, **pengkritik keras** dan **suka menjilat**. Seperti yang telah dijelaskan lebih jelas dan detail pada Bab II dan analisis pada artikel bagian kedua (“Remaja Bercelana Pendek Bervisi Panjang” dalam artikel “Cinta, Gunung, dan Film”), Soe Hok-gie memang dikenal sebagai sosok *intelektual, kritis, serta idealis murni*. Sejak awal, Hok-gie bersikap kritis, terutama kepada pemimpin-pemimpin yang bersikap jauh dari jiwa seorang demokrat sejati. Dalam sebuah catatan hariannya, ia menggugah hatinya untuk bergerak melawan ketidakadilan yang terjadi belakangan ini (sekitar 1950-an hingga 1960-an – pen). Catatan itu antara lain berisi curahan hatinya terhadap sosok yang dianggap sebagai pendiri Indonesia yang dihormati dan disegani, namun jauh dari harapan seorang pemuda Hok-gie (Hok-gie, 1983: 69).

Hok-gie mengkritik Sukarno bukan karena ia benci pada Sang Bung Besar. Hok-gie sangat hormat (dan respek) pada sikap dan sifat Sang Bung Besar, namun sikap Sang Bung Besar yang belakangan ini membuat dirinya resah. Ia lantas bergerak untuk melawan ketidakadilan yang makin merajalela ini. Catatan hariannya tertanggal 10 Desember 1959 menjadi “penanda” awal akan sikap kritisnya terhadap Sang Bung Besar. Kritik Hok-gie bukan tanpa alasan: kemiskinan dan sikap foya-foya Sang Bung Besar adalah bukti “kuat” yang berlawanan (kontras)

situasi dan kondisi Indonesia pada masa itu. Ia mengecam sikap Sang Bung Besar yang “seolah-olah tak mengacuhkan situasi perekonomian Indonesia dan memilih untuk berpesta-pora dengan istri-istrinya yang cantik” (Hok-gie, 1983: 69).

Kritik Hok-gie juga diarahkan kepada para menteri-menteri Sang Bung Besar yang dianggapnya tak sesuai dengan pengamalan jiwa seorang demokrat sejati: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Konteks ini dikaitkan pula dengan kata **suka menjilat** yang ketika itu memang menguat di masa-masa kepemimpinan Sukarno (1950-1965). Konteks **suka menjilat** pada masa-masa Sukarno hampir sama dengan masa-masa setelahnya, Soeharto (Orde Baru, 1966-1998) bahkan berbeda pula dengan masa-masa setelah Orde Baru (pasca-Orde Baru alias Reformasi, 1966-1998 dan pasca-Reformasi, 2004-sekarang), karena tak terekspose dalam pelbagai catatan-catatan sejarah maupun arsip lainnya. Hanya satu media massa yang berani “membongkar” kasus tersebut, yakni *Indonesia Raya*, harian oposisi milik wartawan senior sekaligus sahabat dekat Hok-gie, Mochtar Lubis (1922-2004).

Catatan *Indonesia Raya* mengutip dua kasus **suka menjilat** yang tak terekspose dalam pelbagai catatan sejarah maupun arsip lainnya: kasus korupsi Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani kurun 1950-an dan kasus korupsi PT Pertamina (dulu masih bernama PT Permina – pen) kurun 1960-an. David T Hill, melalui karya fenomenalnya, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia* (2011), mengutip

kedua isu tersebut secara eksplisit, gamblang, dan jelas. Pertama, Menteri Luar Negeri RI Ruslan Abdulgani (1914-2005) dituding menerima suap dari Lie Hok Thay, seorang wakil direktur Percetakan Negara. Tuduhan tersebut akhirnya tak terbukti dan Ruslan dibebaskan serta diperkenankan berangkat ke London untuk menghadiri konferensi (Hill, 2011: 60-62). Kedua (dan terakhir), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Ibnu Sutowo (1914-2001), salah satu anak buah “kepercayaan” Sukarno serta penggantinya, Soeharto (1921-2008), yang ketika itu juga menjabat sebagai Menteri Minyak dan Gas Bumi RI (Juli-Agustus 1966), dituding melakukan tindakan “fatal” terhadap PT Pertamina (dulu PT Permina – pen) semasa ia menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina (1957-1960-an, 1966-1971, dan 1971-1976) hingga ia dicopot pada 1976 (Hill, 2011: 134-138).

Jadi, konteks dua kata **pengkritik keras** dan **suka menjilat** di atas memang disesuaikan dengan apa yang terjadi pada masa itu. Dan, kata **suka menjilat** merupakan kata yang merepresentasikan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di masa itu. Kalaulah digunakan pada konteks saat ini hampir sama, hanya penggunaannya saja yang bisa menafsirkan pelbagai makna. Misalnya, **suka menjilat** bisa mengacu pada hal-hal yang berbau seksual atau sensual atau juga bisa mengacu pada hal-hal lain. Sedangkan, **pengkritik keras** merupakan kata yang pada masa setelah Orde Lama (1959-1965), Orde Baru (1966-1998), menjadi semacam kata yang “tabu” untuk dilakukan dan

diucapkan pada masa-masa tersebut, karena (yang konon berdasarkan dari mulut ke mulut) merupakan masa-masa yang penuh “kesucian dan kemurnian sesuai dengan pengamalan Pancasila”. Sebab, hal itu juga menyangkut keselamatan dan keamanan si pelaku.

2. “Penyumbang Ide dan Tokoh Lapangan” (Artikel: “Pena, Megafon, dan Semeru”)

a. Analisis Sub-judul Artikel

Terakhir, penulis menutup penelitian awal (bagian ketiga – pen) dengan membahas sub-judul pertama dalam artikel ini. Artikel ini juga berisi hampir sama dengan artikel dalam pembahasan di atas. Bagaimana sosok Soe Hok-gie berjuang bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk menggerakkan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka dan Istana Negara (Jakarta) serta Istana Bogor (Bogor), menentang “Kabinet 100 Menteri”-nya Sukarno (yang kemudian digantikan Kabinet Ampera, yang berarti “Amanat Penderitaan Rakjat”) karena terlibat dalam aksi Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) sekaligus melahirkan Tritura (“Tiga Tuntutan Rakjat”) pada Februari 1966. Sama halnya dengan dua bagian awal dalam artikel “Komunis dan Map Hijau”, artikel terakhir ini justru mirip dengan artikel pertama yang membahas bagaimana situasi dan kondisi di Indonesia sepanjang 1960-an saat itu. Sub-judul ini diambil dari majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

b. Analisis Kalimat

Dalam artikel terakhir ini, penulis setidaknya menemukan satu-dua kalimat yang mungkin saling bersinggungan antara satu kalimat dan kalimat lain serta cukup menarik untuk dianalisis lebih dalam

(*K*¹) “Akulah **arsitek** dari *longmarch* ini”, kata Soe Hok-gie, aktivis mahasiswa yang saat itu aktif di Senat Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FS-UI) (Tempo, 2016: 78-79)

(*K*²) Aristides Katoppo, wartawan senior yang dekat dengan Hok-gie, menyebut Hok-gie sebagai “*man of action*”, selain sebagai intelektual (Tempo, 2016: 79)

Pada kalimat pertama (*K*¹) di atas, terdapat satu kata yang dicetak tebal, yakni **arsitek**. Konteks kata itu menunjukkan bahwa Hok-gie, sebagaimana yang telah diuraikan secara eksplisit, gamblang, dan jelas dalam Bab II dan penelitian serta analisis awal dalam Bab III ini, merupakan *the man behind the action* (sosok di balik aksi) dalam aksi demonstrasi 1966 kurun 1960-an. Soe Hok-gie, selain sosok yang intelektual, ia juga pandai menggerakkan massa dan mengerahkan segenap pasukan yang tak terbendung banyaknya. Meskipun ia *arsitek* dalam aksi demonstrasi 1966, Hok-gie secara tak langsung mengakui. Dalam catatan hariannya, Hok-gie merujuk dan menyebut peran andil pada rekan-rekan yang ikut berpartisipasi bersama dirinya kurun aksi demonstrasi 1966 tersebut.

Rekan-rekan tersebut, antara lain Aristides Katoppo dan Cornelis Joost “Josi” Katoppo (Catatan: Aristides adalah bekas pemimpin redaksi dan jurnalis senior *Sinar Harapan*; sedangkan, Josi adalah jurnalis senior dan adik kandung Aristides), Herman Onesimus Lantang (mantan Ketua Mahasiswa Pecinta Alam FS-UI), Fahmi Idris (anggota Dewan Pembina Partai Golongan Karya), Marsillam Simanjuntak, Ismid Hadad, Cosmas Batubara (mantan menteri Orde Baru), Sofjan Wanandi (mantan menteri Orde Baru dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 2014-sekarang), dan lain-lain. (Hok-gie, 1983: 123-162). Belakangan, dua nama terakhir di atas kemudian diketahui “duduk” di parlemen sebagai “pengganti” menteri-menteri yang terlibat dalam G30S/PKI pada masa transisi (Kabinet Ampera atau Kabinet Gotong-royong, 1965-1966) hingga sebelum, semasa, dan sesudah Orde Baru (1966-1998), yang menurut Hok-gie “telah melukai perjuangannya untuk membela rakyat yang tertindas” (Tempo, 2016: 80-81).

Konteks **arsitek** di sini bukan berarti sebagai perancang bangunan atau infrastruktur lainnya, melainkan sebagai penggerak (koordinator atau provokator) yang melakukan suatu aksi gerak-jalan, demonstrasi, dan lain-lain. Penggunaan konteks ini mungkin berdasarkan apa yang diucapkan oleh penuturnya sendiri (Hok-gie) atau bisa juga diciptakan oleh wartawan yang menulis artikel tersebut.

Jadi, konteks ini bisa saja digunakan untuk masa kini, namun dalam artian dan pemaknaan yang bisa jadi berbeda antara satu sama lain.

Lalu, pada kalimat kedua (*K*²), terdapat kata yang dicetak tebal miring, yakni “*man of action*”, yang saling bersinggungan dengan kata sebelumnya, yakni **arsitek**. Konteks “*man of action*” memang bentuk luas dari apa yang dijelaskan dalam paragraf kedua di atas. Konteks ini merupakan konteks yang menjelaskan secara eksplisit, gamblang, dan jelas peran sosok Soe Hok-gie selama kurun 1960-an, termasuk aksi demonstrasi 1966. Bagaimana ia menggerakkan, mengerahkan, hingga mendorong aksi demonstrasi 1966 menentang kepemimpinan Sukarno, yang dimulai dari Jakarta (Istana Merdeka dan Istana Negara) hingga Bogor (Istana Bogor).

Bermula dari penembakan terhadap mahasiswa UI yang bernama Arief Rachman Hakim oleh pasukan Tjakrabhirawa atau Cakrabirawa (kini Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres) di depan Gedung Fakultas Kedokteran UI di Salemba, Jakarta, mahasiswa UI lantas bergerak menentang aksi dan digerakkan oleh Hok-gie sendiri. Kemudian, kurun Januari hingga April 1966, puluhan mahasiswa UI dan golongan lainnya bergerak dari Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta menuju Bogor untuk mengancam sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor yang dianggap Hok-gie dan rekan-rekan tidak memenuhi salah satu “syarat” utama Tritura (Tiga

Tuntutan Rakyat, antara lain: bubarkan PKI, bersihkan kabinet Sukarno dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga).

Konteks *“man of action”* digambarkan dalam laporan tersebut cukup eksplisit, gamblang, dan jelas, sebab peran Hok-gie mungkin dianggap paling menonjol dibanding rekan-rekan yang telah dianggap Hok-gie “paling berjasa” dalam aksi demonstrasi 1966. Jika digunakan dalam konteks masa kini, bisa jadi lain maknanya. Sebab, konteks itu hanya mungkin berhubungan dengan situasi ketika itu, bukan situasi masa kini. Penggunaan konteks *“man of action”* sudah pernah digunakan sebelumnya oleh majalah *Tempo* edisi khusus menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 dengan mengangkat sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang berjudul “Pengorbanan Sang Pembela Republik” (17-23 Agustus 2015).

Konteks serupa dalam edisi tersebut ditemukan pada artikel utama “Pentas Politik Sang Raja” dan terdapat pada sub-artikel yang berjudul “Tritunggal di Peralihan Rezim”. Kutipan tersebut menuliskan,

“Tiga serangkai itu memiliki julukan masing-masing. Soeharto disebut *“the man of quick action”* alias orang yang cepat mengambil tindakan. Adam Malik disebut *“a man of instant solution”* alias dianggap cepat mengambil keputusan. Sedangkan, Sultan (Sultan HB

IX – pen) mendapat panggilan “*a man of deliberation*”, karena kebijaksanaannya” (Tempo, 2015: 86-87)

Ada perbedaan dari penggunaan konteks pada majalah *Tempo* edisi 17-23 Agustus 2015 dengan edisi 10-16 Oktober. Yakni penambahan kata *of quick* (cepat tanggap) di depan kata *action* (aksi). Meskipun penggunaan konteksnya sama, namun, sekali lagi, keduanya memiliki makna yang berbeda.

Jadi, konteks **arsitek** dan “*man of action*”, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf di atas masing-masing memiliki makna dan arti yang masing-masing berbeda, tergantung dengan situasi dan kondisi. Sekali lagi, penggunaan kedua konteks tersebut bukan untuk digunakan sebagai pembendaharaan kata yang baru, melainkan sebagai salah satu bentuk kata penegas saja.

C. Analisis Dimensi Praksis Diskursif Artikel dalam Majalah *Tempo*

Kemudian, dimensi Fairclough selanjutnya adalah dimensi praksis atau dimensi wacana. Fairclough, dalam Haryatmoko (2016), menyatakan bahwa dimensi teks adalah bentuk-bentuk yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi teks, cara pengarang mengambil wacana dan *genre*, serta berfokus bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan (Fairclough dalam Haryatmoko, 2016: 25-26). Pada bagian ini, penulis akan berfokus pada proses produksi dan konsumsi teks

artikel (tiga judul artikel utama dan enam sub-judul artikel) yang diambil dari majalah *Tempo* edisi khusus Soe Hok-gie. Serta bagaimana produksi dan konsumsi teks akan saling berhubungan untuk membongkar praksis diskursif dan teks artikel mengenai sosok Soe Hok-gie pada majalah tersebut. Yang mana produksi teks artikel ini adalah dari media massa itu sendiri (*Tempo* – pen) dan sebelum diedarkan ke khalayak umum, sedangkan konsumsi teks artikel adalah pandangan dan pendapat (atau reaksi) dari orang-orang terdekat Soe Hok-gie, masyarakat umum, bahkan media massa yang ikut memberikan pendapat tentang edisi tersebut.

1. Produksi Praksis Diskursif (Praksis Wacana) Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober tentang Soe Hok-gie

Majalah *Tempo* merupakan majalah prestisius yang telah melampaui lebih dari dua periode sejak Indonesia merdeka, yakni Orde Baru (1966-1998), Reformasi (1998-2004), dan pasca-Reformasi (2004-sekarang). Setiap pekan, majalah *Tempo* selalu menerbitkan edisi-edisi yang menarik, enak dibaca, dan perlu (sesuai *tagline* utama majalah produk Orde Baru ini – pen), baik itu edisi biasa (terbit setiap pekan) maupun edisi khusus (untuk menyambut atau merayakan sosok atau lembaga yang pernah berjasa buat Tanah Air serta terbit setiap pekan). Setiap edisi yang diterbitkan (baik edisi biasa maupun edisi khusus), pasti mengandung makna, tujuan, alasan, tertentu. Terutama edisi khusus, yang mungkin dirasa cukup “penting” buat sosok atau lembaga yang bersangkutan yang dinilai berjasa buat Tanah Air.

Seperti edisi khusus *Tempo* pada 10-16 Oktober 2016 yang mengangkat Soe Hok-gie, sosok yang dikenal kurun dekade 1960-an sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, dan pecinta alam (pendaki gunung). Bukan tanpa alasan seluruh jajaran awak redaksi majalah *Tempo* memilih untuk mengangkat sosok pemuda berketurunan Tionghoa tersebut dalam edisi mereka kali ini. Ada alasan tertentu mengapa sosoknya diangkat oleh *Tempo*. Yang pasti tak ada kaitannya dengan situasi dan kondisi, khusus dalam perpolitikan, di Tanah Air pada masa itu (1960-an) dan kini (2010-an). Salah satu kutipan yang diambil dari rubrik pengantar majalah tersebut antara lain,

“Soe Hok-gie adalah demonstran dan pendaki gunung yang mati muda. *Tempo* kali ini menerbitkan liputan khusus tentang pria yang menginspirasi para mahasiswa di era Orde Baru itu. *Tempo* menyusuri jejak-jejak perjalanan dan pemikirannya dari bekas rumahnya di Jalan Kebon Jeruk IX, Jakarta hingga wafatnya di puncak Gunung Semeru pada 16 Desember 1969 silam—pada usia 27 tahun (Catatan: Hok-gie lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Seharusnya ia wafat pada usia 26 tahun, bukan usia 27 tahun sebagaimana yang tertulis dalam beberapa liputan, baik di *Tempo* maupun liputan lain-lainnya – pen) (*Tempo*, 2016: 18)

Dari kutipan pembuka edisi majalah tersebut di atas, jelas *Tempo* ingin menjelaskan awal tujuan peliputan edisi khusus ini. Sebab, sekali lagi, *Tempo* ingin memberi penegasan bahwa edisi tersebut mungkin saja tak ada kaitannya dengan situasi politik di Indonesia antara kurun 1960-an dengan masa kini (2010-an – pen). Tetapi, lebih menonjolkan pada sepak terjang sosok pemuda berketurunan Tionghoa itu. Mulai dari aktivitasnya sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, hingga pecinta alam (pendaki gunung).

Edisi khusus tersebut terdiri atas tiga judul artikel utama serta empat-lima sub-judul artikel inti, yakni, “Ideologi-Inspirator” (judul artikel utama: “Komunis dan Map Hijau”, yang terdiri atas lima sub-judul artikel: “Burung Tanpa Kaki”; “Strategi Liar Seorang Demonstran”; “Rahasia dalam Map Hijau”; **“Gusar di Tengah Pembantaian”**; dan **“Mengeras di Negeri Abang Sam”**), “Profil” (judul artikel utama: “Cinta, Gunung, dan Film”, yang terdiri dari lima sub-judul artikel: **“Buah Tak Jatuh dari Babah”**; **“Remaja Bercelana Pendek Bervisi Panjang”**; “Tiga Asmara Berakhir di Pendakian”; Anak Gunung Nomor 007”; dan “Gie ala Mira-Riri”), dan “Gerakan Mahasiswa” (judul artikel utama “Pena, Megafon, dan Semeru”, yang terdiri dari empat sub-judul artikel: **“Pengkritik Keras Bung Besar”**; **“Penyumbang Ide dan Tokoh Lapangan”**; “Gincu dan Kutang untuk Teman Seperjuangan”; dan “Firasat Mimpi Tiga Mayat”) (Catatan: tulisan cetak tebal atau hitam

merupakan penelitian utama penulis yang telah dibahas pada pembahasan awal Bab III ini – pen).

Dari ketiga judul artikel utama dan enam sub-judul artikel di atas, penulis, sekali lagi, menekankan bahwa apa yang hendak diangkat oleh *Tempo* melalui edisi khusus 10-16 Oktober 2016 tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk mendalami serta menelusuri peranan pemuda berketurunan Tionghoa itu sepanjang aksi demonstrasi 1966 kurun 1960-an. Dan, bukan untuk membandingkan keterkaitannya dengan situasi perpolitikan di Tanah Air antara kurun 1960-an dengan 2010-an. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan awal Bab III ini di atas (bagian analisis teks – pen), penulis menyakini bahwa tak ada maksud lain dari pihak *Tempo* untuk mengangkat sosok Soe Hok-gie, yang mungkin dianggap oleh (sebagian) kalangan di Tanah Air sebagai “tokoh (minoritas) yang tak layak dijadikan bahan pemberitaan”, baik di media massa cetak maupun elektronik. Pandangan ini (mungkin) datang dari kalangan mayoritas (yakni, kalangan “Islam ortodoks” [“Islam kolot” atau “Islam fanatik”] maupun kalangan “Islam puritan”) maupun kalangan fanatik lainnya.

Kemudian, dalam catatan kata pengantar selanjutnya pada rubrik edisi ini, *Tempo* mulai membandingkan antara Hok-gie dengan Ahmad Wahib (1942-1973), salah seorang jurnalis awal *Tempo* yang meninggal akibat tertabrak sepeda motor sepulangnya dari Senen (kantor redaksi *Tempo* yang pertama sebelum pindah ke Palmerah – pen). Ditulis oleh

Salim Said, jurnalis senior sekaligus pendiri awal *Tempo* (1971-1987), yang juga mantan sahabat dekat mendiang Hok-gie dan Wahib semasa hidup, dengan tuturan yang enak dan renyah untuk dibaca. Berbeda dengan yang dibahas pada bagian dua Bab III ini (yang ditulis melalui sudut pandang *Tempo*, bukan sudut pandang Salim sebagai penulis resensi rubrik buku *Tempo* edisi 6-13 Agustus 1983), kata pengantar yang kedua lebih berfokus pada persamaan dan perbedaan antara Hok-gie dan Wahib.

Salim, sebagai jurnalis senior (baik di dalam maupun di luar *Tempo*), mengenal lebih dekat sosok Soe Hok-gie dan Ahmad Wahib, mantan rekannya di *Tempo* dan ia memandang sosok Soe Hok-gie dan Ahmad Wahib antara lain,

“Soe Hok-gie pada dasarnya seorang aktivis, sedangkan Ahmad Wahib adalah seorang perenung. Perbedaan ini dengan sendirinya membawa akibat luar biasa pada catatan harian mereka. Catatan harian Hok-gie adalah catatan kegiatan, sementara Ahmad Wahib mencatat renungan-renungannya. Hok-gie, dengan sangat jelas, melemparkan pikiran-pikirannya lewat sejumlah tulisan di pelbagai surat kabar, majalah, pamflet, dan penerbitan lain di dalam dan luar negeri” (*Tempo*, 2016: 18)

Berdasarkan kutipan yang ditulis Salim di atas, Hok-gie dan Wahib memiliki persamaan dan perbedaan yang menonjol, yakni suka menulis catatan harian. Perbedaannya, Hok-gie menulis catatan harian dalam bentuk kegiatan, sedangkan Wahib menulis catatan harian dalam bentuk renungan. Dan, tentu sudah jelas alasan, tujuan, dan maksud *Tempo* (dan tentunya Salim) yang mengedarkan edisi khusus tersebut untuk memberikan penggambaran secara lengkap tentang sosok Soe Hok-gie yang (selama ini) tak pernah terekspose di media massa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pasca-kematiannya.

Kemudian, dalam edisi buku yang ditulis (ulang) oleh Tim Buku *Tempo* serta diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dengan judul serupa, *Gie dan Surat-surat Yang Tersembunyi* (2016), kata pengantar edisi buku ini menuliskan satu-satunya “alasan utama” di balik penerbitan versi buku tersebut,

“Soe Hok-gie lahir pada 17 Desember 1942 dan meninggal dalam pendakian di Mahameru, puncak Semeru pada 16 Desember 1969. Banyak cara untuk mengenangnya dan kami memilih dengan menerbitkan buku ini untuk memperingati 47 tahun wafatnya Hok-gie” (Tempo, 2016: viii)

Jadi, alasan utama *Tempo* mengedarkan edisi khusus (baik versi majalah atau buku) yang mengangkat sosok Soe Hok-gie tersebut adalah,

sekali lagi, untuk mengenang sepak terjangnya sepanjang aksi demonstrasi 1966 kurun 1960-an, baik sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, maupun pecinta alam (pendaki gunung) sekaligus sebagai “hadiah” untuk memperingati kematiannya yang ke-47 (Catatan: peringatan kematian Hok-gie akan jatuh yang ke-49 jika dihitung pada Desember 2018 ini – pen).

2. Konsumsi Praksis Diskursif (Praksis Wacana) Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 tentang Soe Hok-gie

Sebelumnya, pembahasan dimensi praksis dalam Bab III ini mengacu pada maksud, tujuan, dan alasan *Tempo* menerbitkan edisi Soe Hok-gie, baik yang dikutip melalui edisi khusus cetaknya (majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016) maupun edisi buku (*Gie dan Surat-surat Yang Tersembunyi*, 2016) dan telah jelas pula apa maksud, tujuan, dan alasan utama *Tempo* menerbitkan edisi khusus cetak (majalah) maupun dicetak ulang dalam bentuk buku tersebut. Namun, yang terjadi adalah andaikata Soe Hok-gie yang diangkat ke dalam edisi khusus *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 tersebut masih hidup dan sehat seperti sediakala, maka ceritanya berlainan lagi. Para peneliti, baik mahasiswa (sarjana maupun pascasarjana) maupun pembaca setia media massa cetak tak perlu susah-susah untuk meneliti mengenai sosoknya, mengutip kata-katanya, bahkan (mengutip) ungkapan yang tertulis dalam catatan hariannya. Mereka bisa

saja langsung menanyakan semua itu kepada Hok-gie. Itupun seandainya pemuda berketurunan Tionghoa itu masih hidup dan sehat seperti sediakala.

Jika sebelumnya penulis telah menganalisis serta menjelaskan maksud, tujuan, dan alasan utama *Tempo* menerbitkan edisi khusus cetak (majalah) maupun yang dicetak ulang dalam bentuk buku tersebut, maka kini adalah tanggapan, pendapat atau pandangan baik pihak dalam atau luar *Tempo* maupun akibat yang terjadi sebelum atau sesudah edisi ini diedarkan ke khalayak umum. Penulis mengutip beberapa pendapat atau pandangan atas edisi khusus *Tempo* tersebut, baik sebelum maupun sesudah edisi tersebut diedarkan ke khalayak umum.

Tanggapan pertama datang dari Yosep Adi Prasetyo (alias Stanley), Ketua Dewan Pers Republik Indonesia (2016-sekarang). Dalam wawancara dengan *Tempo* pada edisi khusus tersebut, kurang lebih ia mengatakan bahwa,

“Kalau dikeluarkan (atau diedarkan ke khalayak umum – pen), ini akan menimbulkan masalah pada teman-teman yang masih hidup” (Tempo, 2016: 44)

Maksud dari pernyataan Stanley di atas adalah jika edisi khusus *Tempo* tersebut diedarkan bersamaan dengan surat-surat yang ditulis Hok-gie kepada para sahabatnya (antara lain sahabat pena di dalam maupun luar negeri – pen), maka keselamatan dan keamanan pada nama tersebut akan terancam. Sebab, konteks pernyataan tersebut mewakili

kekhawatiran Stanley terhadap edisi khusus *Tempo* ini, yang mana nantinya mungkin dapat memicu perselisihan panjang di antara sahabat-sahabat Hok-gie. Perlu dicatat pula, Stanley adalah sahabat dekat Arief Budiman (alias Soe Hok-djin), kakak kandung Hok-gie, yang tentu mengenal dekat keluarga Hok-gie.

Kemudian, tanggapan kedua datang dari Christianto Wibisono, pendiri awal dan jurnalis *Tempo* serta kini pengamat serta analis ekonomi dan bisnis di Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI). Ia menulis tanggapan tentang edisi khusus *Tempo* tersebut sehari setelah (edisi khusus *Tempo* tersebut) diedarkan dalam *Tempo.co*, edisi 11 Oktober 2016, pukul 00.32 WIB. Kurang lebih ia menulis,

“Semua ini pasti tidak terbayangkan oleh Soe Hok Gie, yang mati muda pada 1969. Andai masih hidup, Soe Hok Gie punya kemampuan untuk menjadi elite di pemerintahan, termasuk menteri kabinet. Tapi ia menolak jalur formal anggota DPR dan justru mengirim lipstik kepada presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), motor demonstrasi yang menjatuhkan Sukarno. Presidium KAMI itu diangkat menjadi anggota DPR Gotong Royong untuk mengukuhkan Soeharto sebagai presiden.

Kakak Soe Hok Gie, Arief Budiman, mengkompensasi kematian adiknya dengan berperan aktif dalam Komite Anti Korupsi 1970 bersama Akbar Tanjung. Arief sebetulnya merasa lebih pas menjadi budayawan dan bukan aktivis sibuk seperti Soe Hok Gie.

Gaya Soe Hok Gie yang tidak konvensional memang sikap sosial demokrat tulen mengikuti pola lawan politik yang *gentleman*, kesatria, dan sportif seperti pandangan Voltaire dan Rousseau, yang berbeda pendapat pandangan tapi tidak perlu bermusuhan secara fisik. Gie memang membenci PKI, tapi ia berada di garis terdepan saat terjadi pembantaian anggota PKI yang dibunuh dan ditahan sewenang-wenang”

(Wibisono, 2016, <https://kolom.tempo.co/read/1001174/andai-soe-hok-gie-tak-mati-muda/full&view=ok> serta diakses pada 15 Desember 2018, pukul 17.47 WIB)

Christianto menulis tanggapan ini berdasarkan dari apa yang ia ketahui melalui rekan-rekan dekat Hok-gie baik di dalam *Tempo* (Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Salim Said, dan lain-lain) maupun luar *Tempo* (Ismid Hadad, Marsillam Simanjuntak, Cosmas Batubara, Sofjan Wanandi, Sarwono Kusumaatmaja, dan lain-lain). Namun, ia mengenal

sedikit sosok Hok-gie dari kakaknya, Arief Budiman, yang juga merupakan kawan dekat (sebagian) para awak jurnalis *Tempo*.

Tanggapan ini menilai, seandainya saja Hok-gie masih hidup dan sehat sediakala, maka ia mengejutkan dunia perpolitikan di Tanah Air dengan sikap-sikap antipatinya terhadap para sahabat seangkatannya yang berbalik arah usai aksi demonstrasi 1966, entah itu “banting setir” sebagai politikus semasa Orde Baru (1966-1998) hingga pasca-Reformasi (2004-sekarang). Sikap tegas dan keras Hok-gie terhadap ketidakadilan, terutama di dunia politik, telah diperlihatkan sejak awal, ketika ia menulis catatan hariannya yang termasyhur pada 10 Desember 1959. Tanggapan itu jelas merupakan “suatu reaksi kejutan” yang terjadi setelah *Tempo* edisi khusus tersebut terbit dan kemudian diedarkan ke khalayak umum.

Terakhir, tanggapan ketiga (serta terakhir) datang dari sahabat-sahabat dekat mendiang Soe Hok-gie yang menyumbangkan tanggapan mereka terkait edisi khusus *Tempo* tersebut. Antara lain, Jeanne Sumual (adik kandung mendiang Hok-gie), Aristides dan Cornelist Joost “Josie” Katoppo (jurnalis senior dan sahabat akrab mendiang Hok-gie), Herman O. Lantang (mantan Ketua Mahasiswa Pecinta Alam “Prajnaparamita” Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan sahabat dekat Hok-gie) Rudy Badil (mahasiswa didikan sekaligus sahabat seperjuangan di Mapala “Prajnaparamita” FS-UI), dan lain-lain, yang dikutip dari laman *Tempo.co/Indonesiana*, pada 12 Oktober 2016, pukul 18.43 WIB.

Tanggapan pertama datang dari adik kandung Hok-gie, Jeanne Sumual, yang kebetulan memiliki ikatan sosial yang kuat dengan Hok-gie (Catatan: hubungan Hok-gie dan Jeanne telah dibahas secara detail, rinci, dan jelas dalam pembahasan Bab III ini – pen) dan kurang lebih ia mengatakan,

“*Cool* itu lebih cocok ke kakak saya yang satunya, Arief Budiman. Kalau Hok-gie itu doyan ngomong”

(Sumual, 2016, <https://indonesiana.tempo.co/read/94122/2016/10/12/isti.timo.1/6-hal-tentang-soe-hok-gie-yang-tidak-banyak-diketahui> serta diakses pada 18 Desember 2018, pukul 11.02 WIB)

Lalu, tanggapan kedua datang dari Aristides dan Cornelis Joost “Josie” Katoppo (alias Katoppo bersaudara), yang juga sahabat dekat mendiang Hok-gie dan keduanya kurang lebih mengatakan,

“Tapi gantinya, ia membuatkan tulisan dengan data yang bagus”

(Katoppo, 2016, <https://indonesiana.tempo.co/read/94122/2016/10/12/isti.timo.1/6-hal-tentang-soe-hok-gie-yang-tidak-banyak-diketahui>

[diketahui](#) serta diakses pada 18 Desember 2018, pukul 11.08 WIB)

“Kalau kami mendaki duluan, pasti kami tersesat. Biar pun jalannya sudah hapal, tetap saja kami tersesat”

(Katoppo, 2016,

<https://indonesiana.tempo.co/read/94122/2016/10/12/isti.timo.1/6-hal-tentang-soe-hok-gie-yang-tidak-banyak->

[diketahui](#) serta diakses pada 18 Desember 2018, pukul 11.10 WIB)

(Catatan: dalam kutipan atau potongan percakapan mengenai tanggapan sosok mendiang Hok-gie di bagian atas, terdapat dua nama “Katoppo”. Nama “Katoppo” yang pertama adalah Aristides Katoppo, jurnalis senior dan mantan pemimpin redaksi *Sinar Harapan* kurun 1960-an hingga 1980-an. Kemudian, nama “Katoppo” yang kedua adalah Cornelis Joost “Josi” Katoppo, adik kandung Aristides sekaligus jurnalis senior – pen)

Tanggapan ketiga datang dari Herman Onesimus Lantang, mantan Kepala Mahasiswa Pecinta Alam “Prajnaparamita” Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kurang lebih ia mengatakan,

“Dia apa saja diomongin, betah *ngomong*”

(Lantang, 2016,
<https://indonesiana.tempo.co/read/94122/2016/10/12/isti.timo.1/6-hal-tentang-soe-hok-gie-yang-tidak-banyak-diketahui> serta diakses pada 18 Desember 2018, pukul 11.28 WIB)

Dan, tanggapan yang terakhir datang dari Rudy Badil, mantan personel Warung Kopi Prambors (kini Warung Kopi Dono Kasino Indro atau Warkop DKI; Catatan: seluk beluk beliau telah dibahas pada bagian profil Soe Hok-gie dalam Bab II – pen), jurnalis senior *Kompas*, sekaligus mantan mahasiswa didikan serta sahabat dekat Hok-gie. Kurang lebih ia mengatakan,

“Film *GIE* (film yang disutradarai oleh Riri Reza dan Mira Lesmana yang sebagian besar naskahnya “diambil” dari *Catatan Seorang Demontran* milik Hok-gie serta ditayangkan pada 2005 silam) itu salah *casting*. Aslinya, Hok-gie itu cerewet banget. Kami sampai bingung. Ini orang apa kagak capek *ngomong* terus”

(Badil, 2016,
<https://indonesiana.tempo.co/read/94122/2016/10/12/isti.timo.1/6-hal-tentang-soe-hok-gie-yang-tidak-banyak-diketahui>

[diketahui](#) serta diakses pada 18 Desember 2018, pukul

11.24 WIB)

Dari beberapa tanggapan di atas, masing-masing penanggap memiliki kesan dan pesan yang serupa mengenai sosok mendiang Soe Hok-gie. Jeanne Sumual, adik kandung Hok-gie, memandang film *Gie* (2005) yang diedarkan di bioskop-bioskop di seluruh Tanah Air memiliki “perbedaan yang mencolok” mengenai karakter mendiang kakaknya itu. Selain memuji, Jeanne lalu mengkritik karakter yang “tak layak” sebagai penggambaran mendiang kakaknya dalam film yang disutradarai oleh Riri Reza dan Mira Lesmana tersebut. Jeanne lebih membandingkan karakter mendiang kakaknya, yang diperankan oleh aktor Nicholas Saputra tersebut, pantas disematkan pada Arief Budiman (alias Soe Hok-djin), kakak laki-laki Jeanne. Karena memiliki kedekatan emosional saat Hok-gie masih hidup, tentu apa yang disampaikan oleh Jeanne itu memang pantas disematkan pada Arief ketimbang Hok-gie.

Kemudian, Aristides dan Cornelis Joost “Josie” Katoppo (alias Katoppo bersaudara), Herman O Lantang, serta Rudy Badil juga menanggapi sosok mendiang Hok-gie sebagai sosok yang *nyeleneh*, usil, konyol, namun juga baik hati. Tanggapan mereka ini berdasarkan pada perkawanan yang telah terjalin kurun hampir satu dekade (1960-an, mulai dari 1961 hingga 1969). Dan, tanggapan mereka juga merupakan “buah” dari apa yang telah mereka lihat dan dengar langsung dari mendiang Hok-

gie sepanjang hidupnya. Aristides, Josie, Herman, Badil, dan kawan-kawan mendiang Hok-gie lainnya tentu memiliki tanggapan, pendapat, dan pandangan yang mungkin bisa serupa, namun, bisa juga berbeda.

D. Analisis Dimensi Praksis Sosio-Kultural Artikel dalam Majalah *Tempo*

Kemudian, dimensi Fairclough yang akan menjadi pembahasan terakhir dalam Bab III ini adalah dimensi praksis sosio-kultural. Pada bagian ini, penulis akan memusatkan perhatian analisisnya pada asumsi-asumsi yang berada di luar konteks sosial yang dapat memengaruhi wacana media dalam pemberitaannya. Fairclough, dalam Haryatmoko (2016), menyatakan bahwa dimensi praksis sosio-kultural biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis sosial budaya yang luas. Serta, metodenya mencakup deskripsi bahasa tentang teks, interpretasi terhadap hubungan antara proses wacana dan teks, dan penjelasan hubungan antara proses wacana dan proses sosial (Fairclough dalam Haryatmoko, 2016: 23-24).

Mengenai data penelitian, media cetak (Majalah *Tempo*) menjadi data primer penulis dalam melakukan penelitian ini. Teks dari artikel yang telah dipisah terlebih dahulu telah dipilih sesuai dengan tema dari artikel mengenai sosok Soe Hok-gie dan minoritas (berkaitan dengan rasialisme dan etnisitas). Penulis menggunakan analisis metode pendekatan Fairclough dalam meneliti bagian terakhir ini karena pembahasan Bab III ini memang berkaitan dengan teks media atau *intertekstualitas*.

Dalam pembahasan terakhir ini, penulis akan mengungkapkan semua yang dapat memengaruhi wacana dalam artikel pemberitaan. Dalam dimensi praksis sosio-kultural, Fairclough membagi dimensi praksis sosio-kultural (atau sosio-budaya) menjadi tiga bagian: *situasional*, *institusional*, dan *sosial*. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis deskripsi dimensi praksis sosio-kultural dengan menggunakan tiga bagian di atas.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab I, pembahasan utama penelitian ini mengacu pada dua konteks (utama), yakni minoritas (berkaitan dengan rasialisme dan etnisitas, terutama isu-isu Tionghoa) dan Soe Hok-gie. Berdasarkan dari dua konteks (utama) di atas itulah, yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti isu-isu yang (belum atau telah) diangkat ke dalam majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 ini, yang kebetulan “mengangkat” Soe Hok-gie, sosok yang dikenal sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, maupun pecinta alam (pendaki gunung) kurun 1960-an, sebagai reportase utama (*headline news*) dalam edisi khusus majalah tersebut. Meskipun alasan utama Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 mengangkat sosok Soe Hok-gie yang dikenal sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, maupun pecinta alam (pendaki gunung)—yang telah dibahas dalam bagian kedua Bab III ini, namun di balik itu semua, penulis juga harus meneliti kembali alasan di balik edisi tersebut.

Ketika edisi khusus *Tempo* tersebut terbit pada 10 Oktober 2016, peristiwa atau insiden apapun yang berkelindan dengan edisi khusus *Tempo* tersebut juga saling berhubungan serta menjadi isu utama dalam penelitian ini (Catatan: *Tempo* menerbitkan edisi pekanan setiap hari Senin, namun diedarkan setiap hari Selasa

di seluruh Tanah Air. Khusus edaran setiap hari Senin hanya berlaku di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek saja – pen).

Ada dua peristiwa atau insiden besar yang bersamaan dengan edisi khusus *Tempo* tersebut terbit, yakni pesta demokrasi rakyat setiap lima tahun sekali (Pemilihan Kepala Daerah 2017 [atau Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta] yang masing-masing diperebutkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok)-Djarot Saiful Hidayat [petahana, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan lainnya]; pasangan Anies Baswedan [mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI “Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla”, 2014-2016]-Sandiaga Salahuddin Uno [calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 02, 2019-2024; didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan lainnya]; serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono [anak pertama presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono]-Sylviana Murti [mantan walikota Jakarta Pusat, 2008-2010; didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan lainnya]) dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) di depan masyarakat Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada September 2016 lalu (Catatan: peristiwa terakhir telah dibahas sebagai “perbandingan” terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yakni analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis*).

Dari dua peristiwa atau insiden yang berkelindan dengan edisi khusus *Tempo* ini, maka penulis hanya mengambil satu peristiwa (meskipun peristiwa

lainnya juga berkaitan dengan isu yang sama, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok). Yakni kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) di depan masyarakat Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, September 2016 silam dan merupakan sebuah “kasus mahabesar dan mahadashyat” sejak pasca-Orde Baru alias Reformasi (1998-2004) dan pasca-Reformasi (2004-sekarang).

David T Hill, dalam *Pers di Masa Orde Baru* (2011), juga sempat mengutip kasus serupa yang menimpa tabloid *Monitor* di masa pengujung Orde Baru (1990-an). Tabloid yang dipimpin oleh budayawan Arswendo Atmowiloto itu akhirnya “berhenti” terbit pada awal 1990-an akibat pemberitaan yang diduga “menghina” Nabi Muhammad Saw dan Arswendo sendiri dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Perlu diketahui, *Monitor* adalah “anak cabang” dari PT Kompas-Gramedia yang kurun 1980-an hingga 1990-an ikut berperan dalam menyajikan pemberitaan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di Indonesia (Hill, 2011: 58).

Pertama, konteks *situasional* dalam edisi khusus *Tempo* tersebut di atas adalah Pilkada (Pilgub DKI Jakarta) dan kasus penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok). Namun, penulis lebih memilih kasus penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) karena keterkaitan antara edisi khusus *Tempo* dan kasus Ahok (selanjutnya penggunaan istilah “kasus penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama” disingkat menjadi “kasus Ahok” saja – pen). Yakni, sosok yang diangkat dalam edisi khusus *Tempo*

tersebut dan pelaku utama peristiwa yang terjadi bersamaan berasal dari etnis yang sama: etnis Tionghoa.

Meskipun kasus Ahok baru “menyebar” sekitar dua pekan setelah edisi khusus ini terbit, namun, tetap saja sorotan penulis tak bisa lepas antara Hok-gie dan Ahok, yakni sama-sama berasal kalangan minoritas (etnis Tionghoa). Berawal dari potongan (atau kutipan) *video* yang menyorot pidato Ahok ketika berkampanye di kawasan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, September 2016 dan diduga mengutip potongan salah satu isi dari Alquran, yakni Surat Al-Maidah ayat 51 (dikutip dari laman <https://nasional.tempo.co/read/873597/kasus-penodaan-agama-ahok-divonis-2-tahun-penjara/full&view=ok> dan diakses pada 19 Desember 2018, pukul 19.56 WIB).

Namun, akibat kasus ini, sentimen yang berbau suku, **AGAMA**, ras, dan antar-golongan (SARA), menguat dan menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran menentang Ahok pada 3 November dan 2 Desember 2016 (dikenal dengan “Aksi 112” dan “Aksi 212”), yang kemudian berlanjut pada 11 dan 21 Februari 2017 (yang dikenal juga dengan “Aksi 112” dan “Aksi 212”). Ujung dari kasus tersebut berakhir “kepuasan” dari kalangan mayoritas, yakni vonis Pengadilan Negeri II Jakarta Selatan yang menghukum Ahok dengan hukuman penjara dua tahun. Meskipun ada beberapa kalangan mayoritas yang kurang (atau tidak) setuju maupun puas atas vonis PN II Jakarta Selatan tersebut. Terutama dari kalangan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI, telah dibubarkan pada 2017 silam), serta golongan “Islam ortodoks” maupun “Islam puritan” lainnya (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial->

[38204802](#) dan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170502092141-20-211501/gnpf-akan-gelar-aksi-bela-islam-55> serta diakses pada 19 Desember 2018, pukul 20.17 WIB)

Selanjutnya, dalam konteks *institusional* ini, penulis akan melihat bagaimana reaksi atau respon di dalam maupun luar media massa itu sendiri (*Tempo* dan pemerintah), yakni keterkaitan antara edisi khusus *Tempo* dan kasus Ahok. Dalam edisi khusus tersebut, *Tempo* “mengangkat” posisi Soe Hok-gie dalam edisi khusus mereka untuk mengenang aksi demonstrasi 1966 serta juga menerbitkannya ke dalam bentuk buku kecil atau saku dengan judul yang sama, *Gie dan Surat-surat Yang Tersembunyi* (2016, diterbitkan atas “kerjasama” *Tempo* dengan Kepustakaan Populer Gramedia) sebagai “hadiah” khusus guna memperingati kematiannya yang ke-47 pada Desember 2016 silam. Bukan untuk membandingkan sosok Hok-gie dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama, meskipun keduanya berasal dari etnis yang sama, yakni Tionghoa (Heryanto, 2015: 119; *Tempo*, 2016: vii-viii) (Catatan: tahun terbit edisi tersebut kebetulan juga bertepatan pada 50 tahun aksi demonstrasi 1966 serta bertepatan pula dengan peringatan yang amat kontroversial, yakni “Supersemar” alias “Surat Perintah 11 Maret”, yakni proses peralihan kekuasaan antara Presiden Sukarno (1901-1970) dan Letnan Jenderal Soeharto (1921-2008), Menteri Panglima Angkatan Darat RI—menggantikan posisi Jenderal Anumerta Ahmad Yani (1922-1965) yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI pada 30 September-1 Oktober 1965—pada 11 Maret 1966 atau masa transisi dari Orde Lama, 1959-1965 ke Orde Baru, 1966-1998).

Sedangkan, reaksi (atau respon) pemerintah mengenai edisi khusus *Tempo* tersebut tak terlalu menonjol akibat kasus Ahok yang dianggap “lebih bernilai” ketimbang edisi khusus *Tempo* itu. Sebab, kasus Ahok merupakan suatu “kasus besar” dan pastinya “lebih bernilai” karena mengandung *magnitude* (kekuatan) yang cukup dahsyat, sehingga menarik pelbagai media massa untuk meliput jalannya kasus tersebut. Sebab, peliputan kasus tersebut sudah sesuai dengan kaidah atau esensi dalam jurnalistik (Kusumaningrat, 2005: 66). Kecuali pemberitaan media massa cetak atau elektronik yang lebih berpihak pada kalangan mayoritas karena merasa menjadi “*playing victim*” atau “korban yang dipersalahkan”. Namun, keterkaitan antara edisi khusus *Tempo* dan kasus Ahok tersebut tetap terlihat benang merahnya, dan mungkin saja suatu nanti, sosok Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) bisa juga diangkat ke dalam bagian dari pemberitaan mereka, baik dalam bentuk edisi pekanan biasa maupun edisi khusus.

Terakhir, dalam konteks *sosial* ini, penulis akan mencari keterkaitan antara edisi khusus *Tempo* tersebut dengan kasus Ahok, baik di dalam segi ekonomi, politik, dan lainnya. Di segi ekonomi misalnya, kasus Ahok menyebabkan kurs rupiah merosot (menurun drastis) akibat terjadinya “Aksi 411” dan “Aksi 212” (4 November dan 2 Desember 2016) serta aksi lanjutan yakni, “Aksi 112” dan “Aksi 212” (11 dan 21 Februari 2017) yang digelar untuk “mengadili” Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) akibat kasus penistaan terhadap agama. Aksi demonstrasi seperti aksi-aksi di atas selain juga memengaruhi segi ekonomi, juga memengaruhi segi politik, yakni hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terlebih para pendukung kalangan mayoritas yang merasa menjadi *playing victim*

atau “korban yang dipersalahkan” dalam kasus tersebut. Efeknya adalah rasa ketidakpercayaan kalangan mayoritas (terutama “Islam ortodoks” dan “Islam puritan”) terhadap kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dianggapnya tak mendukung sikap pan-mayoritasisme selama kepemimpinannya (2014-sekarang) (dikutip dari laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html> dan diakses pada 19 Desember 2018, pukul 20.27 WIB).

Yang terjadi adalah berbaliknya sebagian para pendukung petahana ke pendukung Prabowo Subianto (yang “didukung” oleh kalangan mayoritas, antara lain berasal dari kalangan “Islam ortodoks” dan “Islam puritan”) sejak kasus Ahok. Padahal, dalam pertarungan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 silam, Prabowo Subianto (Partai Gerindra) merupakan “pendukung” utama pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama ketika melawan kubu petahana, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Sebab, Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok), sepanjang karir politiknya, telah “berkelana” ke bermacam-macam partai politik, mulai dari Partai Golkar, Partai Gerindra hingga Partai PDI-P (isu akan bergabungnya Ahok ke PDI-P secara permanen semakin “menguat” semenjak kabar jelang bebas murninya Ahok pada 24 Januari 2019 mendatang) (Catatan: petahana dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 adalah Fauzi Bowo, sedangkan calon wakilnya, Nachrowi Ramli, adalah mantan “petinggi dan jenderal” di masa Orde Baru, 1966-1998)

(Catatan: Posisi penulis dalam penelitian terakhir, yakni dimensi sosio-kultural, dalam Bab III ini bukan untuk memihak ataupun menyudutkan kalangan penulis,

yakni mayoritas. Namun, memandang kalangan mayoritas di Indonesia sebagai “salah satu kekuatan politik paling utama yang amat sangat menentukan masa depan Indonesia kelak”, bukan sebagai “alat politik”, sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia belakangan ini, terutama semenjak kasus Ahok bermula – pen).

E. Catatan Penutup

Setelah penulis menganalisis secara keseluruhan dari apa yang sebenarnya berada di balik majalah *Tempo* edisi khusus tentang sosok Soe Hok-gie pada 10-16 Oktober 2016 dalam Bab III ini, barulah penulis menyadari jika majalah *Tempo* memang tak sembarang mengangkat suatu isu-isu yang menguat di Tanah Air sejak 1971 silam. Apalagi *Tempo* memiliki prinsip-prinsip dan dasar-dasar jurnalistik, sebagaimana produk-produk jurnalistik (cetak) lainnya (seperti *Kompas*, *Suara Karya*, *Sinar Harapan*, dan lainnya). Selain itu, *Tempo* juga memiliki pelbagai narasumber yang kredibel dan objektif, meskipun dalam sejarah panjangnya, *Tempo* pernah sekali kena “skakmat” akibat pemberitaan yang dianggap tak sesuai dengan kenyataan (edisi April-Mei 2006; Tempo, 2011: 65-69). Penyampaian bahasa yang lugas, kuat, serta enak dibaca dan perlu (sesuai *tagline* utama majalah *Tempo*)—juga diiringi dengan data dan fakta yang kuat di lapangan—menjadikan *Tempo* (serta *Kompas*) sebagai media massa cetak yang paling banyak dinikmati dan dibaca di kalangan terdidik di Tanah Air.

Ada dua alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan majalah *Tempo* sebagai data primer (data utama). **Pertama**, penulis mengangkat majalah *Tempo* edisi khusus ini karena ketertarikan penulis pada sudut pandang (perspektif) *Tempo* dalam menyajikan pemberitaan di setiap artikelnya. Teknik *cover both side* (atau tak memihak antara satu dengan lainnya sesuai dengan data dan fakta yang ada [dan tersedia] di lapangan) menjadi alasan selanjutnya penulis untuk meneliti majalah *Tempo* edisi khusus ini. Dan **kedua** (sekaligus terakhir) adalah bagaimana majalah *Tempo* memandang suatu sosok (tokoh) atau lembaga yang diangkat sebagai bahan pemberitaan edisi mereka (baik edisi pekanan maupun edisi khusus) tanpa adanya batasan sosial-budaya, seperti suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Misalnya, *Tempo* mengangkat edisi khusus kali pertama pada awal milenium, yakni “Bapak Bangsa Indonesia” (antara lain, “Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia”; “Hatta: Jejak-jejak Yang Melampaui Zaman”; “Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil”; “Tan Malaka: Bapak Republik Yang Terlupakan”; dan “Mohamad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuji”). Selain itu, *Tempo* juga menerbitkan edisi khusus “Orang Kiri Indonesia” (antara lain, “Musso: Si Merah di Simping Republik”; “Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara”; “Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara”; dan “Sjam: Lelaki Dengan Lima Alias”), sebagai “*sparring partner*” dari edisi khusus sebelumnya (edisi khusus “Bapak Bangsa Indonesia”), yang kemudian berlanjut pada edisi khusus lainnya hingga sekarang.

Edisi khusus Soe Hok-gie merupakan edisi khusus kedua *Tempo* yang mengangkat sosok minoritas dari kalangan Tionghoa (yang mungkin akan menjadi edisi khusus *Tempo* selanjutnya mengenai tokoh minoritas, baik dari kalangan Tionghoa maupun lainnya – pen) setelah sebelumnya edisi khusus *Tempo* mengangkat tokoh dan pelopor pergerakan hak asasi manusia di Indonesia, Yap Thiam Hien (“Sang Pendekar Keadilan”, *Tempo*, 3-9 Juni 2013 dan ditulis ulang ke dalam bentuk buku dengan judul serupa, 2013). Meskipun yang diangkat oleh *Tempo* merupakan sosok (atau tokoh) atau lembaga berasal dari kalangan mayoritas dalam edisi mereka (baik edisi pekanan maupun edisi khusus), tak ada satupun tujuan dan niatan dari *Tempo* untuk memilah-milah sosok (atau tokoh) atau lembaga dari golongan mana yang akan diangkat. Itulah mengapa keberagaman (pluralisme) lebih mengental dalam majalah yang didirikan oleh Goenawan Mohamad itu.

Kemudian, *Tempo* bertumpu pada ideologi yang telah cukup lama “mengakar” di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga sekarang, yakni keberagaman (pluralisme). Seperti yang telah ditulis dalam paragraf pertama bagian ini (bagian penutup Bab III – pen), ideologi *Tempo* sangat tampak jelas yakni, tak memihak antara satu kubu (atau kelompok) dengan lainnya, tetap mengedepankan teknik *cover both sides* selama peliputan serta (sekali lagi) mengedepankan sisi-sisi pluralisme yang ada di Indonesia tanpa dinding maupun sekat yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Melalui pernyataan di atas-lah yang juga (sekali lagi) mendorong minat penulis untuk menulis (atau meneliti)

penelitian mengenai liputan *Tempo* (baik edisi editorial pekanan khusus maupun edisi editorial pekanan biasa) yang diedarkan tiap pekannya.

Menurut Janet Steele, *associate professor* (guru besar rekanan) George Washington University (GWU), Amerika Serikat dan penulis buku *Wars Within* (2007), seperti yang dikutip dari buku *Cerita di Balik Dapur Tempo: 40 Tahun (1971-2011)* (2011)—yang mengenal cukup dekat para awak *Tempo* pasca-bredel 1994,

“Rahman Tolleng (almarhum) menyatakan bahwa *Tempo* adalah majalah sekuler dan seharusnya tak menggunakan teks Islam untuk membangun suatu argumentasi.

Kegigihan Rahman Tolleng (almarhum) pada pluralisme *Tempo* berkaitan dengan isu yang lebih penting, yaitu kebebasan serta ikhtiar majalah untuk mempertanyakan kepercayaan, kebudayaan yang sudah disanjung, apakah itu agama, nasionalisme, ataupun rasa hormat terhadap kekuasaan” (Tempo, 2011: 73)

Pernyataan Janet Steele di atas merupakan hasil “pengamatan”-nya selama mengikuti perkembangan *Tempo* dari masa pasca-bredel 1994 (sekitar 1998-1999 – pen) hingga pertengahan 2000-an. Kemudian, hasil “pengamatan”-nya terhadap *Tempo* tersebut dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul *Wars Within* (2007), yang menceritakan gambaran penelitiannya secara detail mengenai *Tempo* yang dia lakukan kurun 1998 hingga pertengahan 2000-an.

Jauh sebelum pernyataan Janet—yang “mengamati” *Tempo* dari sisi dalam dan luar—di atas, *Tempo* tak satupun pernah memihak antara satu kubu dengan kubu lainnya pada peliputannya, baik dalam bentuk *hard news* (berita utama, dengan unsur 5W+1H: *what, who, why, when, where* dan *how*), *soft news* (berita ringan) maupun *feature* (karangan khas), di seluruh *platform* milik *Tempo*. Meskipun pula, banyak kalangan (yang berpendidikan) menganggap liputan *Tempo* agak sedikit terlalu “memihak”, terutama pada rubrik politik; apalagi ketika memasuki tahun-tahun politik (Contoh: berita tentang Pemilu 2019 yang diulas *Tempo*, baik media cetak maupun media sosial, yang saling “memancing” sisi emosional antara kubu petahana, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan kubu pesaing, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikoesoemo-Sandiaga Salahuddin Uno).

Pengamatan Janet terhadap *Tempo* mengenai sikap “keberpihakan” rupanya telah “diprediksi” jauh-jauh dalam edisi pertama *Tempo* yang bertanggal 6 Maret 1971. Pemimpin redaksi *Tempo* yang pertama, Goenawan Mohamad (alias GM, kini redaktur senior *Tempo*), menulis kata pengantar dalam edisi perdana itu antara lain,

“Azas jurnalisme kami bukanlah azas jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melengkapinya, bukan membenihkan

kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba” (Tempo, 2011: 49)